



LAPORAN PENELITIAN
DIPA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2005

OPTIMALISASI STRUKTUR EKONOMI PROPINSI JAWA TIMUR MELALUI PEMBERDAYAAN DI SEKTOR BASIS

Oleh:

Drs. Ec. Bustani Berachim
Nurul Istifadah, SE., M.Si.

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2005,
Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga
Nomor 4683/J03/PP/2005
Tanggal 4 Juli 2005
Nomor Urut : 23

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

November, 2005

ECONOMIC DEVELOPMENT



LAPORAN PENELITIAN
DIPA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2005

OPTIMALISASI STRUKTUR EKONOMI PROPINSI JAWA TIMUR MELALUI PEMBERDAYAAN DI SEKTOR BASIS

Oleh:

Drs. Ec. Bustani Berachim
Nurul Istifadah, SE., M.Si.

KKB
KK-2
LP 96/08
Ber
0



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2005,
Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga
Nomor 4683/J03/PP/2005
Tanggal 4 Juli 2005
Nomor Urut : 23

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

November, 2005



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS AIRLANGGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066
E-mail : infolemlit@unair.ac.id - http://lppm.unair.ac.id

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

1. Judul Penelitian : **Optimalisasi Struktur Ekonomi Propinsi Jawa Timur Melalui Pemberdayaan Di Sektor Basis**

a. Macam Penelitian : () Fundamental, () Terapan, () Pengembangan, () Institusional

b. Katagori Penelitian : () I () II () III () IV

2. Kepala Proyek Penelitian

a. Nama Lengkap dan Gelar : **Drs.Ec. Bustani Berachim**

b. Jenis Kelamin : **Laki-Laki**

c. Pangkat/Golongan dan NIP: **Pembina (Gol. IV/a) 131 406 097**

d. Jabatan Sekarang : **Lektor Kepala**

e. Fakultas/Puslit/Jurusan : **Ekonomi**

f. Univ./Inst./Akademi : **Universitas Airlangga**

g. Bidang Ilmu Yang Diteliti : **Ekonomi**

3. Jumlah Tim Peneliti : **2(dua) orang**

4. Lokasi Penelitian : **Surabaya**

5. Kerjasama dengan Instansi Lain

a. Nama Instansi : -

b. A l a m a t : -

6. Jangka Waktu Penelitian : **5 (lima) bulan**

7. Biaya Yang Diperlukan : **6.000.000,00**

8. Seminar Hasil Penelitian

a. Dilaksanakan Tanggal :

b. Hasil Penelitian : () Baik Sekali (V) Baik
() Sedang () Kurang

Surabaya, Nopember 2005



Mengetahui/Mengesahkan :

a.p. Rektor

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Prof. Dr. H. Sarmanu, MS.
NIP. 130 701 125

RINGKASAN

**OPTIMALISASI STRUKTUR EKONOMI PROVINSI JAWA TIMUR
MELALUI PEMBERDAYAAN DI SEKTOR BASIS**

Bustani Berachim, Nurul Istifadah

**Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi
Universitas Airlangga Surabaya**

Pemberdayaan dan peningkatan peran Jawa Timur terhadap perekonomian nasional memerlukan optimalisasi sektor basis (sektor kunci) sebagai sektor yang mampu menggerakkan sektor-sektor lain. Optimalisasi pengembangan di sektor basis, secara tidak langsung akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Jawa Timur. Kegiatan basis dapat sebagai penggerak pertama (*prime mover role*) dimana setiap perubahan mempunyai efek multiplier terhadap perekonomian regional. (Glasson, 1990 : 64)

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis pola struktur ekonomi provinsi Jawa Timur sejak Pelita I tahun 1969 sampai sekarang; (2) mengidentifikasi sektor ekonomi yang merupakan sektor basis yang perlu dikembangkan sebagai sektor potensial di provinsi Jawa Timur sehingga mampu memacu tingkat pertumbuhan ekonomi; (3) merumuskan strategi pemberdayaan pada sektor basis sebagai sektor kunci di Jawa Timur; dan (4) merumuskan strategi pembangunan sektoral yang perlu diterapkan sehingga dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur.

Penelitian dilakukan secara kualitatif eksplanatori. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis sektor basis yang merupakan sektor yang paling dominan (sektor kunci) dan dapat sebagai penggerak sektor-sektor lainnya di provinsi Jawa Timur. Disamping itu, dianalisis juga tentang perubahan pola sektoral sejak pelita I sampai dengan sekarang. Untuk melihat sektor apakah yang paling dominan di Jawa Timur dilakukan analisis dengan menggunakan metode

Location Quotient (LQ) dengan menggunakan data PDRB sektoral. Sektor yang diidentifikasi adalah sektor basis dan non basis mulai tahun 1969 (Pelita I) sampai dengan tahun 2004 (data PDRB terakhir) yang dikelompokkan berdasar perencanaan jangka menengah (lima tahunan) dan jangka panjang (PJPT).

Bila LQ lebih besar dari pada satu ($LQ > 1$) berarti industri tersebut “kuat” atau merupakan sektor basis dan dapat mengeksport produksinya ke daerah lain atau tenaga kerjanya mampu melayani pasar ekspor. Sedangkan bila LQ kurang dari satu ($LQ < 1$) berarti industri tersebut hanya mampu memasarkan produksinya di dalam daerah yang bersangkutan atau merupakan sektor non basis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi pergeseran pola struktur ekonomi sektoral di provinsi Jawa Timur sejak Pelita I sampai dengan sekarang, yaitu terjadi pergeseran peran dari sektor pertanian ke sektor industri dan sektor perdagangan, hotel & restoran. Pada Pelita I – IV struktur perekonomian di Jawa Timur adalah di sektor pertanian. Pelita V struktur perekonomian bergeser menjadi sektor industri. Sejak Pelita VIII (tahun 2004) struktur perekonomian bergeser perlahan ke sektor perdagangan, hotel & restoran.

Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa sektor pembangunan yang patut dikembangkan di Jawa Timur berdasar urutan prioritas adalah :

- a. Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran
- b. Sektor Pertanian
- c. Sektor Industri Pengolahan
- d. Sektor Jasa-Jasa
- e. Sektor Pengangkutan & Komunikasi
- f. Sektor Listrik, Gas & Air Bersih
- g. Sektor Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan
- h. Sektor Bangunan
- i. Sektor Pertambangan & Galian

Strategi pemberdayaan pembangunan di sektor basis sebagai sektor kunci di provinsi Jawa Timur adalah dengan (a) mengalokasikan dana perencanaan pembangunan secara konsisten terutama untuk sektor basis, (b) prioritas pengembangan untuk sektor basis terlebih dulu, baru kemudian untuk sektor lainnya, dan (c) kebijakan pemerintah daerah Jawa Timur hendaknya secara konsisten mendorong pertumbuhan di sektor basis.

Untuk mengoptimalkan pembangunan ekonomi di Jawa Timur, strategi pembangunan yang perlu dilakukan adalah strategi pembangunan tidak berimbang dengan prioritas pada sektor basis. Prioritas pembangunan pada sektor basis diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain (basis dan non basis) untuk berkembang.

Kata kunci: Struktur ekonomi; pemberdayaan; peningkatan ekonomi.

Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Airlangga
SK Rektor Nomor : 468/JO3/2005
Kontrak Nomor : 688/JO3.2/PG/2005
Tanggal : 5 Juli 2005

SUMMARY

OPTIMALIZATION OF ECONOMIC STRUCTURE WITH BASIC ACTIVITY EMPOWEMENT AT THE EAST JAVA PROVINCE

Bustani Berachim, Nurul Istifadah

Departement of Economic, Airlangga University, Surabaya

One of the objectives of macro economic plan in East Java is to increase the target of economic development. One of the indicator of economic development is the number of actual Gross Domestic Product (GDP) or GDP at constant price increased.

The number of GDP per capita represent the level of community welfare in a country. It is calculated by dividing GDP with the total number of population. GDP per capita is applied to analyze the level of social welfare because there is a positive correlation between them.

The basic sector is a priority in the economic development plan in East Java in the terms of budget limitation. The volume and development of economic in East Java may improve by identifying the basic sector as a key factor. Hence, the number of GDP in East Java will increase as well as the number of national GDP.

The purpose of this research is (1) to identify economic sector that can be a key sector (2) to find a empowerment strategy for the chosen key sector (3) to promote the chosen empowerment strategy in order to maximise the economic development in East Java.

The analytical technique to calculate the dominant sector or basic sector uses Location Quotient (LQ) approach. The calculation is based on the sectoral value added or GDRP of East Java. If $LQ > 1$, it presents basic sector. If $LQ < 1$, it presents non basic sector.

This research shows that manufacturing industrial sector in East Java increased rapidly before economic crisis in 1998. However, the role of this sector has been decrease during the crisis time. The role of the agricultural sector has been stable during the crisis time. Meanwhile, the rate of trade, hotel, and restaurant sector increase significantly. In summary, trading sector has a role in increasing economic development in East Java. East Java is the gate of trading sector in Kawasan Indonesia Timur (Katimin).

Funded by DIPA Airlangga Univesity
Number of SK Rector : 468/JO3/2005
Number of Contract : 688/JO3.2/PG/2005
Date : July 5, 2005

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT bahwa penelitian ini telah dapat selesai dilakukan tepat pada waktunya. Hal tersebut tidak lepas dari beberapa dorongan, pengertian, dan kesabaran beberapa pihak. Untuk itu ucapan terima kasih saya sampaikan kepada beberapa pihak yang membantu dalam penyelesaian penelitian ini :

1. Bapak Prof. DR. H. Sarmanu M.S, sebagai ketua LPPKM Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan sehingga penelitian ini dapat terlaksana.
2. Bapak Drs. Ec. Karjadi Mintaroem, M.Si., sebagai Dekan FE Unair, yang memberikan kelonggaran waktu dan fasilitas untuk pelaksanaan penelitian.
3. Bapak dan Ibu pegawai kantor Statistik Provinsi Jawa Timur yang telah membantu dalam menyediakan data yang sangat berguna dalam penyelesaian penelitian ini.
4. serta pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah langsung maupun tidak langsung membantu proses penelitian ini.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hasil penelitian ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik membangun akan senantiasa terbuka untuk kesempurnaan hasil penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah Jawa Timur untuk peningkatan perencanaan pembangunan regional di Jawa Timur

Surabaya, Desember 2005

Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN DAN SUMMARY	iii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Perumusan Masalah	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
II.1 Penelitian Terdahulu	4
II.2 Pembangunan Ekonomi di Negara Sedang Berkembang ..	4
II.3 Konsep PDRB Dan Pertumbuhan Ekonomi	5
II.4 Teori Basis Dan Non Basis Ekonomi	7
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	13
III.1 Tujuan Penelitian	13
III.2 Manfaat Penelitian	13
BAB IV METODE PENELITIAN	14
IV.1 Pendekatan Penelitian	14
IV.2 Definisi Konseptual	14
IV.3 Sumber Data	15
IV.4 Tehnik Analisis Data	15
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	18
V.1 Kondisi Daerah dan Gambaran Pembangunan Ekonomi Jawa Timur.....	18
V.2 Pola Struktur Ekonomi Provinsi Jawa Timur : Sejak Pelita I Sampai Sekarang.....	25
V.3 Identifikasi Sektor Basis Di Jawa Timur Sebagai Sektor Potensial Yang Mampu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	33
V.4 Strategi Pemberdayaan Sektor Basis Di Jawa Timur	36
V.5 Strategi Pembangunan Ekonomi Sektoral di Provinsi Jawa Timur	37

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	39
VI.1 Kesimpulan	39
VI.2 Saran-Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN – LAMPIRAN	43

DAFTAR TABEL

1	PDRB Jawa Timur dan PDB Indonesia Tahun 1994 – 2003	20
2	Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi, Tahun 1990 – 2003	22
3	PDRB Sektoral Provinsi Jawa Timur Berdasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 1993, Tahun 1993 – 2003	23
4	Distribusi Sektoral PDRB Sektoral Provinsi Jawa Timur Berdasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 1993, Tahun 1993 – 2003	24
5	PDRB Sektoral Provinsi Jawa Timur Berdasar Harga Yang Berlaku, Tahun 1975 – 2004 (Juta Rupiah)	29
6	PDRB Sektoral Provinsi Jawa Timur Berdasar Harga Konstan, Tahun 1975 – 2004 (Juta Rupiah)	30
7	Distribusi PDRB Sektoral Provinsi Jawa Timur Berdasar Harga Yang Berlaku, Tahun 1975 – 2004 (Juta Rupiah)	31
8	Distribusi PDRB Sektoral Provinsi Jawa Timur Berdasar Harga Konstan, Tahun 1975 – 2004 (Juta Rupiah)	32
9	Location Quotient (LQ) Sektoral Di Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 1995 – 2003	34
10	Location Quotient (LQ) Sektoral Di Jawa Timur Atas Dasar Konstan 1993, Tahun 1995 – 2003	35

DAFTAR GAMBAR

1	Pertumbuhan PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 1993, Tahun 1994 – 2003	20
2	Kontribusi PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 1993 Terhadap PDB Nasional	21
3	Pertumbuhan LQ Sektoral Di Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 1995 – 2003	35
4	Pertumbuhan LQ Sektoral Di Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 1995 – 2003	36

DAFTAR LAMPIRAN

1	Riwayat Hidup Ketua Peneliti	43
2	Riwayat Hidup Anggota Peneliti	44

BAB I PENDAHULUAN



I.1 Latar Belakang Permasalahan

Salah satu tujuan perencanaan makro ekonomi di Indonesia adalah target pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami peningkatan. Sebagai salah satu indikator tingkat pertumbuhan ekonomi nasional adalah meningkatnya nilai Produk Domestik Bruto (PDB) riil atau nilai PDB atas dasar harga konstan (Rahardja & Manurung, 2001 : 178).

Survei Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia Pasifik (UN-ESCAP) di 20 negara menyatakan bahwa Perekonomian Indonesia saat ini berada pada tingkat yang *stagnan*, yaitu lima persen. Hal ini berbeda dengan tingkat pertumbuhan ekonomi regional yang diperkirakan tumbuh lebih besar hingga 6,2 persen pada tahun 2004 (Kompas, 17 April 2004).

PDB riil yang meningkat dapat diartikan sebagai peningkatan output ekonomi secara riil atau peningkatan aktivitas volume perekonomian. Untuk memperoleh PDB riil atau PDB harga konstan, terlebih dulu harus menentukan tahun dasar (*based year*) yang merupakan tahun dimana perekonomian berada dalam kondisi baik/stabil. Penentuan suatu tahun sebagai tahun dasar ditetapkan dalam suatu keputusan Presiden (Keppres).

Perhitungan PDB dapat memberikan gambaran ringkas tentang tingkat kemakmuran suatu negara, dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk, atau yang dikenal sebagai PDB per kapita. Perhitungan PDB maupun PDB per kapita dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan sosial suatu masyarakat. Ada hubungan yang positif antara PDB per kapita dengan tingkat kesejahteraan sosial. Jika PDB per kapita makin tinggi, maka daya beli masyarakat, kesempatan kerja serta masa depan perekonomian makin membaik, sehingga gizi, kesehatan, pendidikan, kebebasan memilih pekerjaan dan masa depan, kondisinya makin meningkat.

PDB nasional merupakan sumbangan beberapa sektor di seluruh wilayah Indonesia yang dihitung secara nasional. Besarnya PDB nasional, apabila dilihat dari daerah penyumbanganya, maka provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai peran besar dalam PDB nasional. Sehingga apabila pengelolaan dan pemberdayaan sektoral di Jawa Timur dapat dikelola secara efisien dan efektif, maka akan membawa dampak besar terhadap peningkatan PDB secara nasional.

Pemberdayaan dan peningkatan peran Jawa Timur dalam perekonomian nasional memerlukan optimalisasi sektor basis (sektor kunci) sebagai sektor yang mampu menggerakkan sektor-sektor lain (basis dan non basis). Optimalisasi pengembangan di sektor basis, secara tidak langsung akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Jawa Timur.

Bertambah banyaknya sektor basis dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan kedalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa di dalamnya dan menimbulkan kenaikan volume kegiatan bukan basis. Sebaliknya, berkurangnya kegiatan basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke dalam daerah yang bersangkutan, dan turunnya permintaan terhadap produk dari kegiatan bukan basis. Dengan demikian sesuai dengan namanya, kegiatan basis merupakan penggerak pertama (*prime mover role*), dimana setiap perubahan mempunyai efek multiplier terhadap perekonomian regional (Glasson, 1990 : 64).

Adanya keterbatasan anggaran dan banyaknya permasalahan ekonomi yang harus ditangani di Jawa Timur, maka strategi pembangunan ekonomi daerah dapat diprioritaskan pada sektor-sektor basis agar dapat menghasilkan output (PDRB) yang optimal. Dengan mengidentifikasi sektor basis sebagai sektor kunci dan kemudian memprioritaskan sector basis untuk dikembangkan, maka secara tidak langsung akan dapat meningkatkan volume perekonomian dan pertumbuhan perekonomian Jawa Timur. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur secara tidak langsung akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

I.2 Perumusan Masalah

1. **Bagaimanakah pola struktur ekonomi provinsi Jawa Timur sejak Pelita I sampai sekarang ?**
2. **Sektor apakah yang merupakan sektor basis yang perlu dikembangkan sebagai sektor potensial di provinsi Jawa Timur sehingga mampu memacu tingkat pertumbuhan ekonomi ?**
3. **Bagaimana memberdayakan sektor basis sebagai sektor kunci di Jawa Timur ?**
4. **Bagaimana strategi pembangunan sektoral yang perlu diterapkan di provinsi Jawa Timur sehingga dapat meningkatkan pertumbuhannya ?**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis adalah mengidentifikasi sektor basis dan sektor non basis dengan menggunakan metode LQ berdasar pendekatan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) di Jawa Timur pada tahun 2001. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada pendekatan wilayah yang digunakan. Sedangkan persamaannya adalah pada penggunaan datanya. Pada penelitian terdahulu menggunakan LQ dengan memakai data PDRB, dan dalam penelitian ini juga menggunakan data PDRB. Wilayah penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah provinsi Jawa Timur yang dianalisis dengan pendekatan SWP, sedangkan dalam penelitian ini adalah provinsi Jawa Timur secara keseluruhan.

II.2 Pembangunan Ekonomi di Negara Sedang Berkembang

Ilmu ekonomi pembangunan mengacu pada masalah-masalah perkembangan ekonomi di negara terbelakang, yaitu negara yang belum maju (*underdeveloped countries*) dan atau negara-negara sedang berkembang (*developing countries*). Negara sedang berkembang mempunyai ciri-ciri antara lain : memiliki tingkat pendapatan per kapita yang rendah, dua pertiga atau lebih penduduknya berada di sektor pertanian, sumber daya alamnya belum diolah, serta mempunyai perekonomian yang dualistis (Jhingan, 1996 : 20 – 24)

Pembangunan (*development*) lebih mengandung makna tentang proses dan upaya pencapaian peningkatan kualitas hidup. Ada tiga elemen penting yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pembangunan, yaitu proses, upaya dan peningkatan kualitas hidup. (Rahardja, 2001, 459-460) Pembangunan ekonomi mempunyai makna yang lebih luas dari pertumbuhan ekonomi. Konsep pertumbuhan ekonomi lebih mengacu pada perubahan-perubahan kuantitatif,

sedangkan pembangunan ekonomi mencakup dimensi kualitatif. (Rahardjo & Manurung, 2001 : 462)

Pembangunan ekonomi merupakan pekerjaan yang sangat besar, rumit dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Pembangunan ekonomi sangat membutuhkan biaya dan pengorbanan yang besar, bahkan pembangunan ekonomi merupakan proses antar generasi. Apa yang dirintis generasi saat ini, baru akan dinikmati oleh beberapa generasi yang akan datang (Rahardja & Manurung, 2001 : 451).

Perkembangan ekonomi didefinisikan sebagai kenaikan pendapatan nasional riil atau kenaikan pendapatan riil per kapita dalam jangka panjang (Jhingan, 1996 : 6-7). Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi dan unsur-unsur perubahan. Perubahan-perubahan tersebut adalah perubahan sikap, perubahan kelembagaan, dan perubahan struktural. Perubahan struktural yang utama adalah struktur produksi dan pengeluaran. Jika perekonomian makin modern, maka sumbangan output sektor industri dan jasa makin meningkat, sedangkan sumbangan output sektor pertanian menurun. Salah satu kriteria negara maju adalah jika output sektor industri memberi sumbangan $\geq 30\%$ output nasional. Jika perekonomian makin maju, komponen pengeluaran juga berubah, dimana porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga menurun, sementara pengeluaran investasi meningkat.

11.3 Konsep PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Output perkapita adalah output total dibagi jumlah penduduk. Indikator output total adalah Produk Domestik Bruto (PDB) (Boediono, 1985 : 1). Nilai PDB suatu periode tertentu merupakan hasil perkalian antara harga barang yang diproduksi dengan jumlah barang yang dihasilkan. (Rahardja, 2001 : 40). Sedangkan untuk perhitungan output daerah digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Cara menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah (Rahardja & Manurung, 2001 : 178) :

$$G_t = \frac{(PDB_t - PDB_{t-1})}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

dimana :

G_t = pertumbuhan ekonomi periode t

PDB_t = Produk Domestik Bruto riil periode t

PDB_{t-1} = Produk Domestik Bruto riil periode t-1

Perhitungan PDB dengan menggunakan harga berlaku dapat memberi hasil yang kurang akurat, karena di dalamnya terdapat unsure perubahan harga disamping perubahan outputnya. Sehingga perhitungan PDB sering menggunakan perhitungan berdasarkan harga konstan. Yang dimaksud dengan harga konstan adalah harga yang dianggap tidak berubah. Untuk memperoleh PDB harga konstan, kita harus menentukan tahun dasar (*based year*) yang merupakan tahun dimana perekonomian berada dalam kondisi baik/stabil. Harga barang pada tahun tersebut digunakan sebagai dasar harga konstan.

Perhitungan PDB akan memberikan gambaran ringkas tentang tingkat kemakmuran suatu negara, dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk. Angka yang diperoleh adalah PDB per kapita. Kelemahan dari perhitungan ini adalah tidak diperhatikannya aspek distribusi pendapatan. Perhitungan PDB maupun PDB per kapita juga dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan sosial suatu masyarakat. Ada hubungan yang positif antara tingkat PDB per kapita dengan tingkat kesejahteraan sosial. Makin tinggi PDB per kapita, tingkat kesejahteraan sosial makin membaik. Jika PDB perkapita makin tinggi, maka daya beli masyarakat, kesempatan kerja serta masa depan perekonomian makin membaik. (Rahardja & Manurung, 2001 : 45).

II.4 Teori Basis - Non Basis Ekonomi

Perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua sektor kegiatan, yaitu sektor basis dan sektor non basis. Kegiatan basis (*basic activity*) adalah kegiatan yang mengekspor barang-barang dan jasa-jasa ketempat-tempat di luar batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan, atau yang memasarkan barang-barang dan jasa-jasa mereka kepada orang-orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan bukan basis (*non-basic activity*) adalah kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal didalam batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan ini tidak mengekspor barang jadi, ruang lingkup produksi mereka dan pasar mereka yang terutama adalah bersifat lokal. (Glasson, 1990 : 63-64).

Bertambah banyaknya basis dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa di dalamnya dan menimbulkan kenaikan volume kegiatan bukan basis. Sebaliknya, berkurangnya kegiatan basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke dalam daerah yang bersangkutan, dan turunnya permintaan terhadap produk dari kegiatan bukan basis. Dengan demikian sesuai dengan namanya, kegiatan basis merupakan penggerak pertama (*prime mover role*) dimana setiap perubahan mempunyai efek multiplier terhadap perekonomian regional.

Multiplier basis ekonomi biasanya dihitung menurut banyaknya tenaga kerja yang dipekerjakan atau pendapatan total dari sektor tersebut. Rumusan efek *employment multiplier* tersebut adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah total tenaga kerja dalam kegiatan-kegiatan basis dan bukan basis}}{\text{Jumlah total tenaga kerja dalam kegiatan-kegiatan basis}}$$

Multiplier ini dapat digunakan untuk memprediksi jumlah total kesempatan kerja dimasa yang akan datang. Hal ini dapat dijelaskan dengan

menyelidiki akibat dari bertambahnya kesempatan kerja dalam industri basis akan menciptakan kesempatan kerja pula bagi kegiatan-kegiatan bukan basis.

Hampir semua studi basis ekonomi menggunakan *employment* (banyaknya pekerja) sebagai satuan ukuran. Hal ini memudahkan untuk penelitian karena data *employment* relatif lebih mudah diperoleh jika dibandingkan dengan data ekonomi lainnya. Namun *employment* sebagai satuan ukuran mempunyai keterbatasan-keterbatasan antara lain : bahwa tenaga kerja pada dua industri basis mempunyai tingkat upah yang berbeda, tingkat produktivitas yang berbeda, dan lain-lain. Misalnya, teknologi usaha tani dan teknologi komputer dapat mempunyai efek multiplier yang sangat berbeda. Kelemahan lain adalah adanya tingkat produktivitas yang berbeda dan perubahan-perubahan produktivitas yang memungkinkan suatu perusahaan bertambah outputnya dan berakibat pada kenaikan kenaikan upah dan pengeluaran tanpa harus menambah jumlah tenaga kerjanya.

Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan basis dan bukan basis adalah masalah yang sulit. Untuk perusahaan industri dan dagang dapat dibagi ke dalam tiga kelompok : perusahaan basis, perusahaan bukan basis, dan perusahaan campuran. Matilla (Glasson, 1990 : 66) mengelompokkan perusahaan pesawat terbang sebagai perusahaan basis, dan perusahaan konstruksi sebagai perusahaan bukan basis, serta perusahaan grosir dan eceran sebagai kegiatan campuran. Dalam prakteknya perusahaan campuran ini sulit untuk dilakukan perhitungan.

Pengalokasian perusahaan campuran ke dalam kegiatan-kegiatan basis dan bukan basis dapat dilakukan dengan mengadakan survei langsung terhadap perusahaan-perusahaan individual atau secara tidak langsung melalui penggunaan informasi yang sudah tersedia seperti tingkat dan jenis pekerjaan pada masing-masing industri. Pendekatan ini mempunyai keterbatasan, selain menjemukan, membutuhkan waktu banyak, dan biaya tinggi.

Pendekatan secara tidak langsung mengenai pemisahan antara kegiatan basis dan kegiatan bukan basis dapat menggunakan salah satu ataupun gabungan dari tiga metode, yaitu : (Glasson, 1990, 66—67)

1. Menggunakan asumsi-asumsi atau metode arbitrer sederhana yang mengasumsikan bahwa semua industri primer dan manufakturing (SIC 1 - 16) adalah basis, dan semua industri jasa (SIC 17 - 24) adalah bukan basis. Metode ini tidak memperhitungkan adanya kenyataan bahwa dalam suatu kelompok industri bisa terdapat industri atau industri-industri yang menghasilkan barang-barang yang sebagian diekspor atau dijual secara lokal maupun kedua-duanya.
2. Metode *location quotients* (LQ) dimana kuosien lokasi suatu industri di suatu daerah dapat dihitung dari rasio berikut :

$$LQ = \frac{\% \text{ tenaga kerja regional dari industri A}}{\% \text{ tenaga kerja nasional dari industri A}}$$

atau

$$LQ = \frac{\% \text{ pendapatan regional dari industri A}}{\% \text{ pendapatan nasional dari industri A}}$$

Dalam metode ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi dalam dua golongan, yaitu (1) kegiatan ekonomi (industri) yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun pasar di luar daerah itu, industri ini disebut industri basis; (2) kegiatan ekonomi (industri) yang hanya melayani pasar di daerah itu sendiri, industri ini disebut industri non basis atau industri lokal.

Dasar penggunaan dari pada tehnik ini adalah teori *economic base* yang maknanya adalah sebagai berikut : karena industri basis itu menghasilkan barang dan jasa baik untuk pasar di daerah maupun untuk pasar di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan hasil ke luar daerah itu mendatangkan arus pendapatan ke dalam daerah tersebut. Arus pendapatan ini menyebabkan baik kenaikan konsumsi maupun kenaikan investasi di daerah itu yang pada gilirannya dapat menaikkan pendapatan lagi dan kesempatan kerja. Jika di daerah itu terdapat pengangguran, maka kesempatan kerja yang baru itu dapat menampungnya, atau jika di daerah itu tidak terdapat pengangguran, maka

daerah itu mempunyai daya tarik bagi orang-orang dari luar daerah yang mencari pekerjaan.

Kenaikan pendapatan di daerah itu tidak hanya menaikkan permintaan terhadap hasil industri basis melainkan juga akan menaikkan permintaan terhadap hasil industri lokal non basis, dan permintaan ini pada gilirannya akan menaikkan investasi di industri-industri tersebut. Dengan perkataan lain, penanaman modal di industri-industri lokal merupakan investasi yang *induced* sebagai akibat kenaikan pendapatan di industri-industri basis.

Berdasarkan gagasan ini, maka orang berpendapat bahwa industri-industri basis inilah yang patut dikembangkan di daerah. Yang pertama harus dilakukan adalah menggolongkan tiap industri dalam suatu daerah kedalam salah satu dari kedua golongan tersebut dengan memakai *location quotient* (LQ). LQ ini mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan atau industri di suatu daerah dengan jalan membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan/industri yang sama dalam perekonomian nasional. Yang dipakai sebagai ukuran penggolongan tersebut dapat berlainan, dan dapat disesuaikan dengan keperluan. Umpamanya jika maksudnya adalah mencari industri atau kegiatan ekonomi yang dapat memberikan kesempatan kerja yang sebanyak-banyaknya, maka yang dipakai sebagai dasar ukuran ialah jumlah karyawan. Kalau yang dianggap perlu adalah menaikkan pendapatan regional, maka pendapatan (*value added*) merupakan dasar ukuran yang tepat, sedang jika hasil produksi yang dipentingkan, maka jumlah hasil produksi yang dipilih.

Kadariah (1982) merumuskan *location quotient* (LQ) ini kedalam rumusan sebagai berikut :

$$\frac{v_i/v_t}{V_i/V_t} \quad \text{atau} \quad \frac{v_i/V_i}{v_t/V_t}$$

dimana :

- vi adalah pendapatan dari industri i di suatu daerah
- vt adalah pendapatan total di daerah tersebut
- Vi adalah pendapatan dari industri i di seluruh negara
- Vt adalah pendapatan total di seluruh negara

Dalam hal ini asumsinya adalah bahwa penduduk di setiap daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan pada tingkat nasional, dan juga bahwa permintaan daerah akan sesuatu barang pertama-tama dipenuhi dengan hasil daerah itu sendiri dan baru jika jumlah yang diminta melebihi jumlah produksi daerah itu, kekurangannya diimpor dari luar daerah.

Menurut Iwan Jaya Aziz (1994), metode LQ adalah cara lain untuk menganalisis perkembangan proses industrialisasi antar daerah dengan mengamati perkembangan LQ, yaitu suatu indikator sederhana yang menunjukkan kekuatan atau besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dibandingkan dengan peranan sektor yang sama di daerah lain.

Bila LQ lebih besar dari satu ($LQ > 1$) berarti industri tersebut “kuat” dan basis dan dapat mengekspor produksinya ke daerah lain atau tenaga kerjanya mampu melayani pasar ekspor. Sedangkan bila LQ kurang dari satu ($LQ < 1$) berarti industri tersebut hanya mampu memasarkan produksinya di dalam daerah yang bersangkutan atau merupakan sektor non basis.

3. Metode kebutuhan minimum (*minimum requirement*) adalah modifikasi dari metode LQ dengan menggunakan distribusi minimum dari *employment* yang diperlukan untuk menopang industri regional dan bukannya distribusi rata-rata. Untuk setiap daerah yang pertama-tama dihitung adalah persentase angkatan kerja regional yang dipekerjakan dalam setiap industri. Kemudian persentase-persentase itu diperbandingkan dengan memperhitungkan hal-hal yang bersifat kelainan, dan persentase terkecil digunakan sebagai ukuran kebutuhan minimum bagi industri tertentu. Persentase minimum ini

dipergunakan sebagai batas dan semua *employment* di daerah-daerah lain yang lebih tinggi dari persentase ini dipandang sebagai *employment* basis. Proses ini dapat diulangi untuk setiap industri di daerah bersangkutan untuk memperoleh *employment* basis total. Dibanding metode LQ, metode ini lebih bersifat arbitrer karena sangat tergantung pada pemilihan persentase minimum dan tingkat disagregasi.

Teori basis adalah penggerak primer bagi perubahan regional dan bahwa pada setiap daerah terdapat suatu rasio *employment* basis / bukan basis tertentu yang tetap konstan walaupun struktur perekonomian daerah yang bersangkutan sudah berubah. Walaupun industri basis merupakan suatu faktor penting yang mendorong perubahan dalam perekonomian regional, namun tidak perlu diragukan bahwa dalam keadaan tertentu kegiatan-kegiatan bukan basis yang sudah berkembang dengan baik dapat menarik masuknya industri basis ke dalam suatu daerah dan dengan demikian dapat menjadi salah satu penentu bagi tingkat kegiatan ekonomi daerah tersebut. Juga sangat mungkin perubahan basis / bukan basispun mengalami perubahan bersama-sama dengan pertumbuhan atau kemunduran yang diperkirakan akan terjadi dimana unsur bukan basis menjadi relatif lebih penting sepanjang waktu.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

III.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis pola struktur ekonomi provinsi Jawa Timur sejak Pelita I tahun 1969 sampai sekarang.
2. Mengidentifikasi sektor ekonomi yang merupakan sektor basis yang perlu dikembangkan sebagai sektor potensial di provinsi Jawa Timur sehingga mampu memacu tingkat pertumbuhan ekonomi.
3. Merumuskan strategi pemberdayaan pada sektor basis sebagai sektor kunci di Jawa Timur.
4. Merumuskan strategi pembangunan sektoral yang perlu diterapkan sehingga dapat mengotimalkan pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur.

III.2 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Pemerintah, sebagai masukan analisis perencanaan ekonomi secara spasial bagi daerah Jawa Timur dengan mengembangkan sektor kunci atau sektor basis sehingga mampu mengoptimalkan tujuan pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja.
2. Pengembangan ilmu perencanaan ekonomi regional khususnya tentang teori optimalisasi struktur ekonomi.
3. Untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan ekonomi sektoral dan regional khususnya di wilayah provinsi Jawa Timur.

BAB IV

METODE PENELITIAN

IV.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang diperkuat dengan pendekatan kualitatif eksplanatori. Penelitian kualitatif lebih mengarah pada teori dan kepustakaan serta substansi masalah yang berasal dari data.

Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis sektor basis yang merupakan sektor yang paling dominan (sektor kunci) dan sebagai penggerak sektor-sektor lainnya di provinsi Jawa Timur. Disamping sektor basis sebagai sektor yang paling dominan dan berpotensi dalam pengembangan perekonomian di Jawa Timur, juga dianalisis tentang perubahan pola sektoral sejak pelita I sampai dengan sekarang.

Untuk melihat sektor apakah yang paling dominan di Jawa Timur dilakukan analisis dengan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ) dengan menggunakan data PDRB sektoral. Metode LQ dengan menggunakan data PDRB digunakan untuk mengetahui sektor basis / sektor kunci sebagai penggerak sektor-sektor lainnya (*prime mover role*).

IV.2 Definisi Konseptual

1. Provinsi Jawa Timur adalah Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 8 kota, yaitu :

Kabupaten : Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep.

Kota : Kediri, Blitar, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Surabaya.

2. Sektor basis adalah sektor yang mempunyai LQ lebih besar dari 1 ($LQ > 1$), baik apabila dihitung dengan pendekatan PDRB maupun dengan tenaga kerja. Sedangkan sektor non basis adalah sektor yang mempunyai LQ kurang dari 1 ($LQ < 1$).
3. Sektor perekonomian dalam PDRB Jawa Timur terdiri dari sembilan sektor perekonomian, yaitu (sejak pelita V) :
 - a. sektor pertanian
 - b. sektor pertambangan dan galian
 - c. sektor industri pengolahan
 - d. sektor listrik, gas, dan air bersih
 - e. sektor konstruksi
 - f. sektor perdagangan, hotel dan restoran
 - g. sektor pengangkutan dan komunikasi
 - h. sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan
 - i. sektor jasa-jasa
4. Sektor PDRB pada Pelita I – IV berjumlah 12 sektor

IV.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Kantor Statistik provinsi Jawa Timur dan beberapa instansi terkait. Data yang dipakai dalam penelitian ini antara lain : PDRB nasional, PDRB Jawa Timur, PDRB kabupaten / kota, PDRB sektoral, PDRB per kapita, penduduk lokal dan nasional, luas wilayah, dan lain-lain.

IV.4 Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Location Quotient* (LQ) dimana perhitungannya didasarkan pada perhitungan nilai tambah sektoral (PDRB). Perhitungan dengan menggunakan data nilai tambah / PDRB digunakan untuk mencari sektor basis yang diharapkan mampu menjadi *leading sector* yang mampu memberikan andil paling besar dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Sektor yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sektor basis dan non basis mulai tahun 1969 (Pelita I) sampai dengan tahun 2004 (data PDRB terakhir) yang dikelompokkan berdasar perencanaan jangka menengah (lima tahunan) dan jangka panjang (PJPT). Dari hasil tersebut kemudian dapat diketahui pola sektoralnya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan strategi optimalisasi pembangunan ekonomi sektoral dan penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.

Perhitungan dengan menggunakan metode LQ dilakukan dengan proses sebagai berikut : membandingkan % nilai tambah (tenaga kerja) sektor "x" di provinsi Jawa Timur terhadap % nilai tambah (tenaga kerja) sektor "x" di tingkat nasional. Formula LQ tersebut adalah :

$$LQ = \frac{\% \text{ tenaga kerja regional Jawa Timur dari industri } i}{\% \text{ tenaga kerja Indonesia dari industri } i}$$

atau

$$LQ = \frac{\% \text{ PDRB Jawa Timur dari industri } i}{\% \text{ PDB Indonesia dari industri } i}$$

atau

$$\frac{v_i/v_t}{V_i/V_t} \quad \text{atau} \quad \frac{v_i/V_i}{v_t/V_t}$$

dimana :

- v_i = PDRB dari sektor i di Jawa Timur
- v_t = PDRB total di Jawa Timur
- V_i = PDB sektor i Indonesia
- V_t = PDB Indonesia

Bila LQ lebih besar dari pada satu ($LQ > 1$) berarti industri tersebut "kuat" atau merupakan sektor basis dan dapat mengekspor produksinya ke daerah lain atau tenaga kerjanya mampu melayani pasar ekspor. Sedangkan bila LQ kurang

dari satu ($LQ < 1$) berarti industri tersebut hanya mampu memasarkan produksinya di dalam daerah yang bersangkutan atau merupakan sektor non basis.

Disamping menghitung nilai LQ pada masing-masing sektor PDRB Jawa Timur, juga dilakukan analisis terhadap pergeseran struktur ekonomi di provinsi Jawa Timur sejak periode Pelita I sampai dengan sekarang. Untuk melihat pola perubahan struktur ekonomi di Jawa Timur dilakukan pengamatan terhadap nilai proporsi peranan masing-masing sektor dari waktu ke waktu. Hal ini untuk membantu dalam menguatkan analisis tentang penentuan sektor kunci dan penyusunan strategi pembangunan ekonomi di Jawa Timur untuk periode pembangunan di masa yang akan datang.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

V.1 Kondisi Daerah dan Gambaran Pembangunan Ekonomi Jawa Timur
Kepulauan di Indonesia yang paling banyak penduduknya adalah pulau Jawa. Pulau Jawa menempati hampir 60% penduduk di Indonesia yang berjumlah lebih dari 215 juta jiwa pada tahun 2003, disusul Sumatera sebesar kurang lebih 20%, dan Kalimantan lebih dari 5%.

Penduduk di pulau Jawa yang terbanyak berada di tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kepadatan penduduk di pulau Jawa pada tahun 2003 sebesar 997 jiwa/m², pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 157 jiwa/km², dan pulau Sumatera sebesar 93 jiwa/km². Selebihnya adalah tersebar di beberapa kepulauan lainnya dengan kepadatan yang sangat jarang. DKI Jakarta menempati urutan sebagai provinsi terpadat di pulau Jawa bahkan di Indonesia. Kepadatan penduduk di DKI Jakarta hampir 13.000 jiwa/km². Sementara itu Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Banten kepadatannya lebih dari 1.000 jiwa/km². Kepadatan penduduk di Jawa Timur adalah 756 jiwa/ pada tahun 2003.

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk dan tingkat kepadatan yang relatif cukup besar di antara provinsi-provinsi lain di Indonesia, sehingga permasalahan di Jawa Timur, baik yang menyangkut bidang kependudukan, perekonomian, dan tingkat kesejahteraan ekonomi, menjadi permasalahan yang strategis di tingkat nasional (lihat Tabel 2). Dengan demikian upaya-upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional hendaknya juga memperhatikan indikator-indikator perkembangan perekonomian di Jawa Timur.

Gambaran tentang indikator perkembangan perekonomian di Jawa Timur dapat dilihat dari besaran nilai PDRB dan atau PDRB per kapita. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar diantara delapan sektor lainnya, disusul kemudian sektor perdagangan, hotel & restoran serta sektor pertanian. Hal ini sangat beralasan mengingat Jawa Timur dengan ibukota Surabaya –

sebagai *growth pole* dari beberapa daerah *hinterland* Gerbangkertasusila – merupakan pintu gerbang perekonomian wilayah Indonesia Timur.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih jauh bahwa pertumbuhan kontribusi sektor perdagangan, hotel & restoran adalah yang paling tinggi dibandingkan sektor pertanian dan industri pengolahan, yaitu sebesar 1,32% selama satu dasawarsa terakhir. Sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel & restoran tumbuh dengan masing-masing minus (-) 1,40% dan minus (-) 0,09%. Hal ini mengindikasikan bahwa di wilayah provinsi Jawa Timur mulai terjadi pergeseran di sektor pertanian menuju perindustrian, yaitu sektor perdagangan dan industri pengolahan (lihat Tabel 3 dan 4).

Sektor industri pengolahan tumbuh pesat di Jawa Timur sebelum terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, namun perannya dalam perekonomian terus menerus mengalami penurunan sejak tahun 1998. Sektor pertanian peranannya relatif konstan walaupun terjadi krisis ekonomi. Sedangkan sektor perdagangan, hotel & restoran menunjukkan tingkat pertumbuhan yang terus meningkat, walaupun pada saat krisis mengalami sedikit penurunan. Hal ini menguatkan peran Jawa Timur – dengan Surabaya sebagai pusat kotanya – sebagai daerah perdagangan dan pintu gerbang perdagangan di Kawasan Indonesia Bagian Timur (Katimin).

Berdasarkan data pada Tabel 1 di bawah ini, proporsi PDRB Jawa Timur terhadap PDB Nasional atas dasar harga berlaku menunjukkan kondisi yang semakin menurun pada saat krisis ekonomi, dan berangsur-angsur meningkat pada masa pemulihan setelah krisis. Sedangkan apabila dilihat dari proporsi PDRB Jawa Timur terhadap PDB Nasional atas dasar harga konstan 1993 maka kontribusinya mengalami penurunan yang relatif sangat kecil. Secara rata-rata kontribusinya relatif stabil. Hal ini mengingat pada tahun tersebut hampir seluruh daerah di Indonesia terkena dampak krisis ekonomi, tidak terkecuali provinsi Jawa Timur.

Tabel 1

PDRB Jawa Timur dan PDB Indonesia, Tahun 1994 – 2003

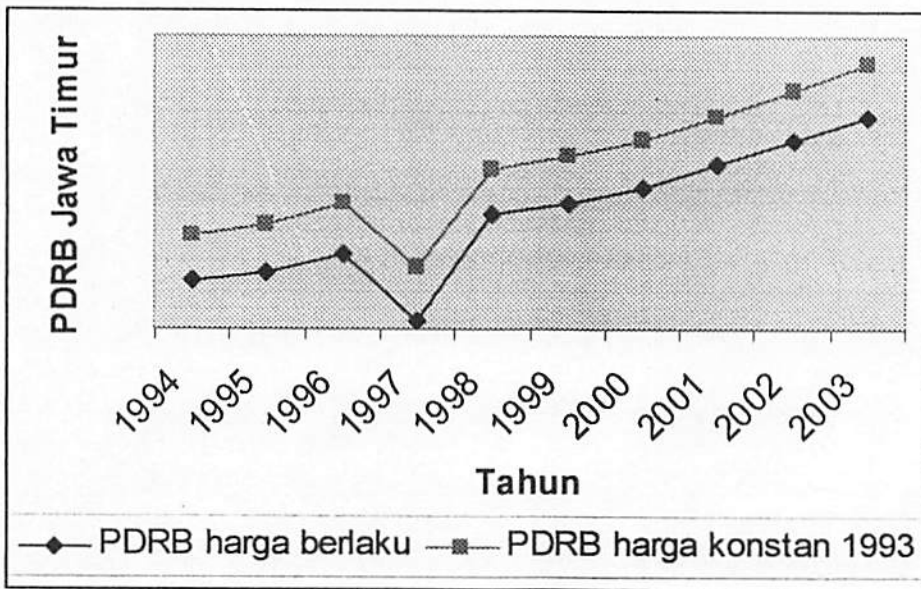
Tahun	PDB Atas Dasar Harga Berlaku			PDB Atas Dasar Harga Konstan		
	Jawa Timur (ribu rp)	Nasional (ribu rp)	% PDRB Jatim thd PDB Nasional	Jawa Timur (ribu rp)	Nasional (ribu rp)	% PDRB Jatim thd PDB Nasional
1994	57.146.453	382.219.724	14,95	52.727.481	354.640.751	14,87
1995	65.883.193	454.514.150	14,50	57.040.504	383.792.330	14,86
1996	87.696.557	532.630.820	16,46	61.752.469	413.797.915	14,92
1997	88.772.383	627.695.519	14,14	64.853.576	433.245.879	14,97
1998	135.753.197	955.753.476	14,20	54.398.897	376.374.853	14,45
1999	150.555.746	1.099.731.598	13,69	55.058.970	379.352.473	14,51
2000	169.680.628	1.264.918.748	13,41	56.856.521	398.016.853	14,28
2001	195.762.784	1.467.654.835	13,34	58.750.180	411.753.484	14,27
2002*	226.957.307	1.610.564.951	14,09	60.754.056	426.942.936	14,23
2003**	254.380.758	1.786.690.919	14,24	63.252.166	444.453.474	14,23

Sumber : Statistik Indonesia 2003, disusun dan diolah kembali.

*) angka sementara, **) angka sangat sementara

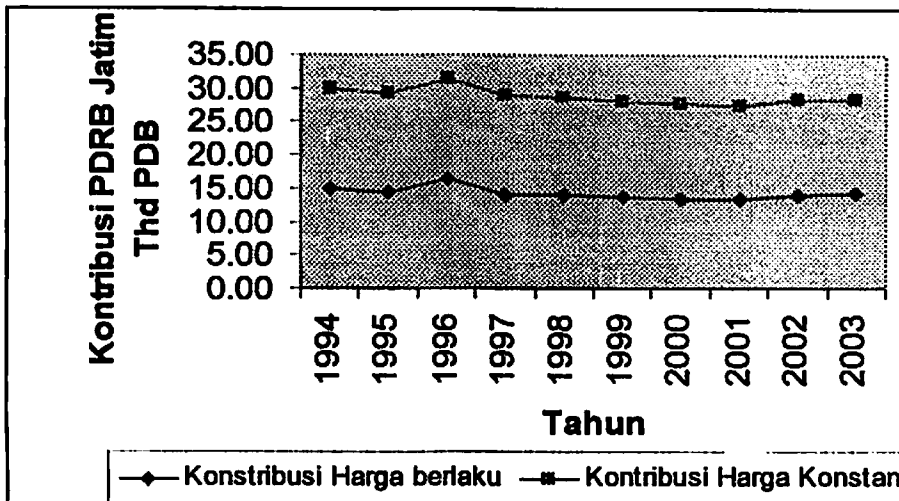
Gambar 1

Pertumbuhan PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 1993, Tahun 1994 - 2003



Sumber : Tabel 1, diolah kembali.

Gambar 2
Kontribusi PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar
Harga Konstan 1993 Terhadap PDB Nasional
Tahun 1994 - 2003



Sumber : Tabel 1, diolah kembali.

Besarnya PDRB Jawa Timur atas dasar harga yang berlaku nilainya lebih besar dibandingkan dengan PDRB atas dasar harga konstan. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh inflasi / kenaikan harga, terutama pada saat krisis ekonomi moneter di Indonesia. Sejak tahun 1998, besarnya nilai PDRB atas dasar harga berlaku jauh lebih besar dari nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 1993. Hal ini merupakan pengaruh besarnya angka inflasi sejak krisis ekonomi moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998.

Akibat krisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur pada tahun 1999 hanya mencapai 1,18%, tetapi pada tahun 2000 mulai membaik dengan pertumbuhan positif 3,19%. Pertumbuhan ini ternyata membawa dampak pada seluruh sektor usaha dan perdagangan yang mulai pulih kembali. Namun dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,2% dan angkatan kerja 2,3%, pertumbuhan ekonomi tersebut belum dapat meningkatkan taraf hidup rakyat secara merata.

Penduduk, Kapadatan Penduduk, dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Provinsi, Tahun 1990 - 2003

Provinsi	Penduduk (ribu jiwa)			Persentase Penduduk (%)			Kapadatan Penduduk			Laju Pertumbuhan (%)		
	1990	2000	2003	1990	2000	2003	1990	2000	2003	1980-1990	1990-2000	2000-2003
Nanggroe Aceh Darussalam	3,416	3,929	4,240	1.91	1.91	1.97	66	76	81	2.72	1.41	2.57
Sumatera Utara	10,252	11,642	11,923	5.74	5.66	5.54	139	158	162	2.06	1.28	0.80
Sumatera Barat	4,000	4,249	4,476	2.24	2.06	2.08	93	99	104	1.62	0.61	1.75
Riau	3,279	4,948	5,596	1.84	2.40	2.60	35	52	59	4.22	4.20	4.19
Jambi	2,018	2,407	2,583	1.13	1.17	1.20	38	45	48	3.39	1.78	2.38
Sumatera Selatan	5,492	6,899	6,522	3.08	3.35	3.03	68	74	70	3.15	2.31	-1.86
Bengkulu	1,179	1,564	1,525	0.66	0.76	0.71	60	79	77	4.38	2.87	-0.84
Lampung	6,016	6,731	6,963	3.37	3.27	3.23	170	191	196	2.66	1.13	1.14
Kep Bangka Belitung	820	900	988	0.46	0.44	0.46	-	56	61	-	0.94	3.16
Sumatera	36,472	43,269	44,816	20.43	21.02	20.82	76	90	93	-	1.72	1.18
DKI Jakarta	8,228	8,381	8,640	4.61	4.06	4.01	12,439	12,635	12,985	2.38	0.16	1.10
Jawa Barat	29,414	35,724	38,138	16.48	17.36	17.72	1,023	1,033	1,100	2.57	1.98	2.20
Jawa Tengah	28,516	31,223	32,175	15.98	15.17	14.95	876	959	987	1.17	0.91	1.01
DI Yogyakarta	2,913	3,121	3,211	1.63	1.52	1.49	914	980	1,007	0.57	0.69	0.95
Jawa Timur	32,488	34,786	36,270	18.20	16.89	16.85	678	726	756	1.08	0.68	1.42
Banten	5,968	8,098	8,999	3.34	3.93	4.18	-	936	1,038	-	3.10	3.58
Jawa	107,527	121,293	127,433	60.24	58.93	59.20	843	951	997	-	1.21	1.88
Bali	2,777	3,150	3,363	1.56	1.53	1.56	493	559	596	1.18	1.27	2.20
Nusa Tenggara Barat	3,369	4,009	4,025	1.89	1.95	1.87	167	199	199	2.14	1.75	0.13
Nusa Tenggara Timur	3,268	3,823	4,094	1.83	1.86	1.90	89	83	86	1.79	1.58	2.31
Bali dan Nusa Tenggara	9,414	10,982	11,482	5.27	5.34	5.33	139	152	157	-	1.55	1.50
Kalimantan Barat	3,228	4,016	3,969	1.81	1.95	1.84	22	27	27	2.65	2.21	-0.39
Kalimantan Tengah	1,396	1,855	1,838	0.78	0.90	0.85	9	12	12	3.86	2.88	-0.31
Kalimantan Selatan	2,597	2,984	3,188	1.45	1.45	1.48	60	69	73	2.32	1.40	2.23
Kalimantan Timur	1,875	2,452	2,720	1.05	1.19	1.26	8	11	12	4.41	2.72	3.52
Kalimantan	9,096	11,307	11,715	5.10	5.49	5.44	16	20	20	-	2.20	1.49
Sulawesi Utara	1,762	2,001	2,136	0.99	0.97	0.99	162	132	140	1.60	1.28	2.20
Sulawesi Tengah	1,703	2,176	2,221	0.95	1.06	1.03	27	35	35	2.82	2.48	0.88
Sulawesi Selatan	6,981	8,051	8,253	3.91	3.91	3.83	112	129	132	1.42	1.44	0.83
Sulawesi Tenggara	1,349	1,820	1,887	0.76	0.88	0.88	35	48	49	3.66	3.04	1.21
Gorontalo	716	833	885	0.40	0.40	0.41	-	68	72	-	1.53	2.04
Sulawesi	12,511	14,881	15,382	7.01	7.23	7.15	65	78	80	-	1.75	1.11
Maluku	1,154	1,163	1,224	0.65	0.56	0.57	40	26	26	2.76	0.08	1.72
Maluku Utara	699	732	858	0.39	0.36	0.40	-	25	28	-	0.46	5.44
Papua	1,630	2,214	2,366	0.91	1.08	1.10	5	6	6	3.40	3.11	2.24
Maluku dan Papua	3,483	4,109	4,448	1.95	2.00	2.07	8	9	10	-	1.67	2.68
Indonesia	178,503	205,841	215,276	100.00	100.00	100.00	95	109	114	1.97	1.44	1.51

Sumber : Statistik Indonesia 2003, disusun dan diolah kembali.

Tabel 3

PDRB Sektoral Propinsi Jawa Timur Berdasar Harga Yang Berlaku, Tahun 1993 - 2003

Sektor	Tahun (Miliar Rupiah)											Pertumbuhan Rata-rata (%)
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	
Pertanian	9,669,999	10,302,358	11,164,745	12,845,397	14,872,969	28,832,429	32,775,611	35,811,358	41,657,757	47,360,511	50,907,467	16.30
Pertambangan & Galian	959,439	1,041,535	1,211,615	1,351,026	1,326,869	1,259,912	2,460,300	3,585,914	3,974,272	4,519,693	4,935,069	18.05
Industri pengolahan	12,382,976	15,586,765	18,718,258	22,097,863	26,343,658	38,257,842	41,158,117	45,616,274	51,779,630	60,337,145	67,021,816	16.59
Listrik & Gas & Air Bersih	716,130	887,851	1,206,634	1,397,128	1,696,647	2,141,754	2,828,380	4,093,704	5,277,651	6,184,081	7,455,509	23.74
Bangunan	3,049,827	3,777,121	4,442,518	5,196,021	5,920,107	7,266,956	7,355,906	7,968,869	8,574,301	9,637,495	10,766,553	12.15
Perdagangan, restoran & Hotel	10,017,909	11,857,873	13,852,310	15,975,481	19,026,576	32,069,409	34,478,053	39,165,955	46,415,169	54,849,450	63,978,773	18.36
Pengangkutan & Komunikasi	3,282,744	3,811,506	4,092,174	4,977,378	5,403,416	8,277,817	9,071,944	10,635,788	11,771,748	14,516,370	16,137,675	15.84
Kuangan, Persew Bgn & Jasa Persh	3,371,935	3,843,789	4,383,501	4,991,241	5,451,219	5,743,606	6,064,713	6,818,610	8,139,800	9,230,582	10,221,630	10.61
Jasa-Jasa	5,741,288	6,237,655	6,811,438	7,735,022	8,730,921	11,903,472	14,382,742	15,984,156	18,172,456	20,341,981	22,856,267	13.43
PDRB	49,172,247	57,146,463	65,883,193	76,666,657	88,772,382	136,763,197	160,666,746	169,680,628	196,762,784	226,957,307	264,380,758	16.11

Sumber : PDRB Propinsi Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, berbagai terbitan, diolah kembali.

PDRB Sektoral Propinsi Jawa Timur Berdasar Harga Konstan 1993, Tahun 1993 - 2003

Sektor	Tahun (Miliar Rupiah)											Pertumbuhan Rata-rata (%)
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	
Pertanian	9,669,999	9,666,050	9,868,093	10,253,902	10,360,820	9,840,471	10,056,430	10,128,247	10,246,977	10,461,875	10,649,955	0.88
Pertambangan & Galian	959,439	855,207	970,067	982,420	875,522	501,799	820,482	1,138,198	1,136,382	1,178,353	1,202,793	2.08
Industri pengolahan	12,382,976	13,990,976	15,802,745	17,698,276	19,409,568	15,104,078	15,096,119	15,357,563	15,567,266	15,335,943	15,767,592	2.22
Listrik & Gas & Air Bersih	716,130	787,545	1,011,892	1,139,847	1,143,104	1,179,195	1,332,448	1,483,158	1,594,202	1,710,560	1,863,984	9.09
Bangunan	3,049,827	3,433,306	3,854,810	4,239,835	4,370,533	2,918,521	2,628,205	2,607,913	2,631,188	2,657,361	2,707,175	-1.08
Perdagangan, restoran & Hotel	10,017,909	10,911,199	11,886,747	12,993,706	13,828,697	11,369,207	11,403,499	11,908,392	12,871,767	13,805,155	14,883,858	3.68
Pengangkutan & Komunikasi	3,282,744	3,504,855	3,800,166	4,162,808	4,236,276	4,051,086	4,441,895	4,745,527	4,792,518	5,327,308	5,531,795	4.92
Kuangan, Persew Bgn & Jasa Persh	3,371,935	3,563,711	3,766,256	3,979,809	4,145,932	3,296,434	3,087,743	3,193,521	3,378,586	3,522,599	3,657,758	0.74
Jasa-Jasa	5,741,288	5,914,633	6,101,730	6,302,066	6,483,126	6,138,106	6,191,149	6,296,011	6,501,294	6,756,904	6,987,258	1.80
PDRB	49,172,247	62,727,462	67,040,606	61,752,469	64,853,676	64,398,897	65,058,970	66,856,620	68,760,180	60,764,066	63,252,166	2.32

Sumber : PDRB Propinsi Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, berbagai terbitan, diolah kembali.

Tabel 4

Distribusi Sektoral PDRB Provinsi Jawa Timur Berdasar Harga Yang Berlaku, Tahun 1993 - 2003

Sektor	Tahun (dalam %)											Pertumbuhan Rata-rata (%)
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	
Pertanian	18.67	18.03	16.95	16.78	16.75	21.24	21.77	21.11	21.28	20.87	20.01	0.16
Pertambangan & Galian	1.95	1.82	1.84	1.76	1.49	0.93	1.63	2.11	2.03	1.99	1.94	-0.05
Industri pengolahan	25.18	27.28	28.41	28.86	29.68	28.18	27.34	26.88	26.45	26.59	26.35	0.41
Listrik & Gas & Air Bersih	1.46	1.55	1.83	1.82	1.91	1.58	1.88	2.41	2.70	2.72	2.93	6.56
Bangunan	6.20	6.61	6.74	6.79	6.67	5.35	4.89	4.70	4.38	4.25	4.23	-3.41
Perdagangan, restoran & Hotel	20.37	20.75	21.03	20.86	21.43	23.62	22.80	23.08	23.71	24.17	25.15	1.93
Pengangkutan & Komunikasi	6.64	6.32	6.21	6.50	6.09	6.10	6.03	6.27	6.01	6.40	6.34	-0.41
Kuangan, Persew Bgn & Jasa Prsh	6.86	6.73	6.65	6.52	6.14	4.23	4.03	4.02	4.16	4.07	4.02	-4.74
Jasa-Jasa	11.68	10.92	10.34	10.10	9.84	8.77	9.54	9.42	9.28	8.96	9.02	-2.31
PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

Sumber : PDRB Propinsi Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, berbagai terbitan, diolah kembali.

Distribusi Sektoral PDRB Provinsi Jawa Timur Berdasar Harga Konstan 1993, Tahun 1993 - 2003

Sektor	Tahun (dalam %)											Pertumbuhan Rata-rata (%)
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	
Pertanian	18.67	18.33	17.30	16.60	15.98	18.09	18.26	17.81	17.44	17.22	16.84	-1.40
Pertambangan & Galian	1.95	1.81	1.70	1.59	1.35	0.92	1.49	2.00	1.93	1.94	1.90	-0.23
Industri pengolahan	25.18	26.53	27.70	28.66	29.93	27.77	27.42	27.01	26.55	25.24	24.93	-0.09
Listrik & Gas & Air Bersih	1.46	1.49	1.77	1.85	1.76	2.17	2.42	2.61	2.71	2.82	2.95	6.62
Bangunan	6.20	6.51	6.76	6.87	6.74	5.37	4.78	4.59	4.48	4.37	4.28	-3.32
Perdagangan, restoran & Hotel	20.37	20.69	20.80	21.04	21.32	20.90	20.71	20.94	21.91	22.72	23.53	1.32
Pengangkutan & Komunikasi	6.64	6.65	6.66	6.74	6.53	7.45	8.07	8.35	8.16	8.77	8.75	2.54
Kuangan, Persew Bgn & Jasa Persh	6.86	6.76	6.60	6.44	6.39	6.06	5.61	5.62	5.75	5.80	5.78	-1.54
Jasa-Jasa	11.68	11.22	10.70	10.21	10.00	11.28	11.24	11.07	11.07	11.12	11.05	-0.50
PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

Sumber : PDRB Propinsi Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, berbagai terbitan, diolah kembali.

V.2 Pola Struktur Ekonomi Provinsi Jawa Timur : Sejak Pelita I tahun Sampai Sekarang

Pembangunan Lima Tahun (Pelita) merupakan implementasi perencanaan pembangunan jangka menengah lima tahunan. Sedangkan pembangunan jangka panjang (PJP) adalah implementasi perencanaan pembangunan jangka panjang dua puluh lima tahun.

Berikut adalah kategorisasi periode waktu Pelita :

1. **Pembangunan Jangka Panjang I : Pelita I – V (1969 – 1994)**
 - Pelita I : tahun 1969 – 1974
 - Pelita II : tahun 1974 – 1979
 - Pelita III : tahun 1979 – 1984
 - Pelita IV : tahun 1984 – 1989
 - Pelita V : tahun 1989 – 1994
2. **Pembangunan Jangka Panjang II : Pelita V – X (1994 – 2019)**
 - Pelita VI : tahun 1994 – 1999
 - Pelita VII : tahun 1999 – 2004
 - Pelita VIII : tahun 2004 – 2009

Periode pembangunan selama Pelita I – V disebut sebagai pembangunan jangka panjang (PJP) I, yaitu rentang periode waktu tahun 1969 - 1994 atau dua puluh lima tahun. Sedangkan PJP II meliputi Pelita VI – X, yaitu tahun 1994 – 2019. Sekarang, provinsi Jawa Timur memasuki era Pelita III PJP II atau Pelita VIII sejak dicanangkannya program perencanaan Pelita.

Pembangunan secara sektoral di Jawa Timur, didekati dengan perhitungan nilai tambah yang dicerminkan oleh nilai sektoral pada PDRB Jawa Timur. Selama Pelita I-IV jumlah sektor yang ada pada PDRB Jawa Timur meliputi 12 sektor ekonomi, yaitu :

1. sektor pertanian
2. sektor pertambangan dan galian
3. sektor industri pengolahan
4. sektor listrik, gas & air bersih

5. sektor bangunan
6. sektor perdagangan, hotel & restoran
7. sektor pengangkutan & komunikasi
8. **sektor keuangan, persewaan bangunan & jasa perusahaan**
9. **sektor bank & lembaga keuangan lainnya**
10. **sektor sewa rumah**
11. **sektor pemerintahan & hankam, dan**
12. sektor jasa-jasa

Namun demikian, sejak Pelita V jumlah sektor pada PDRB Jawa Timur, berubah menjadi hanya 9 sektor, yaitu :

1. sektor pertanian
2. sektor pertambangan dan galian
3. sektor industri pengolahan
4. sektor listrik, gas & air bersih
5. sektor bangunan
6. sektor perdagangan, hotel & restoran
7. sektor pengangkutan & komunikasi
8. **sektor keuangan, persewaan bangunan & jasa perusahaan**
9. sektor jasa-jasa

Untuk menganalisis perekonomian di Jawa Timur secara sektoral dapat dilakukan dengan melihat besarnya sektor-sektor yang ada pada PDRB Jawa Timur. Dari hasil analisis dalam penelitian ini (lihat Tabel 5, 6, 7 dan 8), terlihat bahwa terdapat pergeseran proporsi (peranan) sektoral dari sektor pertanian ke sektor industri dan perdagangan. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan struktur ekonomi di Jawa Timur, dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel & restoran.

Pada awal Pelita I sampai dengan Pelita IV, struktur perekonomian di provinsi Jawa Timur masih didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini sangat beralasan karena sebagian besar penduduk Indonesia berada di sektor pertanian.

Pada awal pelaksanaan pembangunan ekonomi di Jawa Timur (Indonesia) diprioritaskan pada sektor pertanian. Hal ini menopang sebagian besar penduduk Jawa Timur (bahkan Indonesia).

Namun demikian seiring dengan tujuan nasional (*grand design*) pembangunan nasional yang bergeser pada prioritas pembangunan di sektor industri yang menopang sektor pertanian, maka perlahan-lahan peran pertanian digeser oleh peran di sektor industri. Hingga pada akhirnya, memasuki Pelita V peran sektor pertanian digantikan oleh sektor industri dan perdagangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sejak Pelita V, terjadi pergeseran struktur perekonomian di provinsi Jawa Timur dari sektor pertanian menjadi sektor industri (dan perdagangan).

Walaupun sektor pertanian mendominasi selama PJP I (dan masih mempunyai nilai proporsi yang besar pada PJP II), namun pertumbuhan nilai tambah sektoralnya mengalami pertumbuhan yang semakin turun. Sebaliknya sektor perindustrian dan perdagangan mempunyai angka pertumbuhan yang semakin meningkat (positif). Hal ini menunjukkan bahwa besaran *multiplier* sektor industri di Jawa Timur mempunyai nilai yang lebih besar daripada sektor pertanian. Besarnya nilai pengganda di sektor industri (dibanding sektor pertanian) ini dapat disebabkan karena nilai investasi yang dilakukan oleh pemerintah di sektor industri lebih besar daripada di sektor pertanian. Untuk menguatkan analisis ini, sebaiknya perlu data lebih lanjut terkait besarnya investasi sektoral di Jawa Timur.

Pertumbuhan sektoral di Jawa Timur yang paling tinggi sejak Pelita I sampai sekarang adalah sektor bangunan, sektor pertambangan & galian, sektor listrik gas & air minum, dan sektor jasa-jasa. Peranan sektor bangunan dan sektor jasa-jasa meningkat pesat sejak tahun 1984 atau awal Pelita IV. Peranan sektor bangunan pada tahun 1983 adalah 0,92% dan meningkat menjadi 5,12% pada tahun 1984 (Pelita IV). Sedangkan sektor jasa-jasa meningkat pesat sejak Pelita V. Kenyataan ini selaras dengan semakin gencarnya pembangunan perekonomian di provinsi Jawa Timur terutama di sektor konstruksi fisik.

Pada Pelita V dominasi peran sektor pertanian digantikan oleh sektor industri dan sektor perdagangan, hotel & restoran. Artinya struktur ekonomi di provinsi Jawa Timur sejak Pelita V mengalami pergeseran dari struktur ekonomi pertanian menjadi struktur ekonomi industri. Beberapa sektor di Jawa Timur mengalami penurunan sejak Pelita V, yaitu sektor pertanian, sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan, sektor pengangkutan dan sektor komunikasi. Sektor konstruksi mengalami penurunan pada saat krisis ekonomi 1998. Dimana pada saat itu terjadi penurunan aktivitas ekonomi dan aktivitas pembangunan fisik akibat tekanan nilai rupiah dan inflasi yang sangat tinggi.

Pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia (dan Jawa Timur), terjadi penurunan aktivitas ekonomi secara riil. Krisis ekonomi di Indonesia diawali oleh krisis di sektor moneter (nilai tukar dan besaran inflasi yang meningkat secara tidak terkendali). Kemudian krisis ekonomi berimbas secara langsung pada sektor riil dan kesempatan kerja. Akibatnya besaran-besaran sektoral pada PDRB Jawa Timur mengalami penurunan secara signifikan.

Pada perkembangannya, sejak memasuki Pelita V, apabila sektor industri mendominasi peran sektoral PDRB Jawa Timur, maka sejak tahun 2004 (memasuki Pelita VIII) sektor industri perdagangan, hotel & restoran makin menunjukkan perannya melebihi dari sektor industri. Hal ini semakin menguatkan posisi Jawa Timur sebagai wilayah pusat perdagangan di kawasan Timur Indonesia disamping sebagai kawasan industri. Kota Surabaya merupakan pintu masuk perdagangan yang paling besar di provinsi Jawa Timur. Terdapat beberapa pintu masuk perdagangan ke wilayah provinsi Jawa Timur yang menghubungkan dengan wilayah provinsi lainnya, seperti kawasan pelabuhan Gresik, Probolinggo, Bali, dan beberapa wilayah pesisir pantai lainnya.

Kota Surabaya sebagai salah satu daerah kota di Jawa Timur yang merupakan pusat perdagangan terbesar di Jawa Timur. Berkembangnya Surabaya sebagai kawasan perdagangan ditopang oleh adanya infrastruktur perdagangan, pengangkutan, jasa, transportasi, dan komunikasi. Adanya fasilitas pelabuhan dan lapangan terbang Juanda makin memperkokoh peran Surabaya sebagai pintu gerbang perdagangan Jawa Timur dan kawasan Timur Indonesia.

Tabel 6

FDRE Sektorial Proprietary Jawa Tengah Berdasarkan Harga Konstan, Tahun 1975-1994 (Juta Rupiah)

Gedung	Tahun										Perubahan Persen (%)
	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	
Semburan	608.277,57	625.702,21	622.004,02	694.078,91	1.022.807,54	1.124.817,04	1.022.088,89	1.153.048,02	1.153.048,02	3.723.702,10	18,60
Pembangunan & Caden	3.720,83	6.211,52	6.292,40	6.811,58	6.773,27	6.703,10	6.703,32	6.653,53	6.653,53	40.204,00	32,60
Industri Pengolahan	271.140,77	277.439,52	263.363,20	263.363,20	318.528,97	307.033,70	500.537,44	616.248,29	628.629,80	24,18	
Elektrik & Gas & Air Bersih	8.341,57	8.650,49	8.650,49	11.794,69	16.604,94	16.300,89	27.208,16	31.683,81	65.265,70	27,67	
Pengangkutan	13.460,02	19.019,17	20.300,39	20.300,39	22.874,12	27.077,29	32.783,82	40.377,02	601.861,60	46,24	
Pengangkutan Hotel & Restoran	389.365,00	424.690,82	484.393,41	613.965,76	668.406,69	663.361,83	820.407,83	891.703,64	2.160.468,80	19,60	
Pengangkutan & Komunikasi	118.660,19	127.859,85	134.047,64	160.238,38	169.268,69	168.118,01	230.778,80	240.778,80	777.030,40	20,60	
Sektor dan Lembaga Keuangan lain	28.060,28	24.899,43	24.899,43	33.681,04	33.786,04	58.932,40	49.633,76	66.412,44	219.024,50	23,90	
Sektor rumah	43.870,81	47.423,28	51.279,82	56.488,16	60.894,91	64.911,71	70.203,87	82.319,88	283.824,20	16,17	
Pemerintahan	209.090,94	210.474,84	248.659,87	283.788,03	287.240,91	326.394,96	348.616,76	394.131,32	1.013.699,20	17,10	
Jawa-Jawa	43.432,84	45.683,74	48.414,87	62.398,32	64.307,65	68.872,17	69.001,87	74.014,87	683.469,00	31,73	

Sumber : FORD Proprietary Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, berbagai tahun, dalam nominal.

FDRE Sektorial Proprietary Jawa Tengah Berdasarkan Harga Konstan, Tahun 1994-2004 (Juta Rupiah)

Gedung	Tahun										Perubahan (%)	
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003		2004
Semburan	3.723.702	3.829.487	4.003.771	4.083.773	4.144.848	4.278.187	6.669.830	6.669.830	6.669.830	10.050.420	10.048.956	6,29
Pembangunan & Caden	62.204	68.379	70.041	71.844	73.647	75.450	863.507	863.507	863.507	820.482	1.178.353	15,28
Industri Pengolahan	1.828.000	2.019.144	2.203.118	2.444.179	2.685.026	3.082.696	13.960.978	16.922.746	16.922.746	10.600.118	10.350.843	10,74
Elektrik & Gas & Air Bersih	83.266	88.080	710.828	114.822	138.006	138.006	1.011.882	1.158.847	1.332.448	2.482.159	1.894.202	19,89
Pengangkutan	2.160.468	2.347.255	2.540.028	2.650.734	2.828.629	3.288.629	10.811.189	11.988.749	11.988.749	2.607.819	2.797.178	7,51
Pengangkutan Hotel & Restoran	777.000	783.171	803.487	864.411	894.022	968.294	3.663.711	3.663.711	3.663.711	4.481.628	4.883.958	10,02
Pengangkutan & Komunikasi	213.026	247.711	300.610	344.273	403.827	458.321	3.663.711	3.663.711	3.663.711	3.087.743	3.022.060	10,12
Sektor dan Lembaga Keuangan lain	263.024	268.650	263.078	264.679	291.379	291.379	6.101.730	6.101.730	6.101.730	6.101.149	6.764.804	11,89
Sektor rumah	1.913.084	1.100.234	1.174.725	1.203.730	1.290.086	1.259.459	8.101.730	8.101.730	8.101.730	8.101.149	8.501.294	5,72
Pemerintahan & Hankam	683.468	685.689	712.031	743.818	794.334	805.809	6.914.833	6.914.833	6.914.833	6.914.149	6.987.269	1,89
Jawa-Jawa	1.813.189	1.815.288	1.729.437	1.837.842	1.879.847	1.925.181	15.429.483	15.429.483	15.429.483	15.429.483	15.429.483	8,72

Sumber : FORD Proprietary Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, berbagai tahun dan indikator Mikro Ekonomi Jawa Tengah, dalam nominal.

Tabel 7

Sektor	Indikator PDB Sektorial Proprietas Jasa Timor Berdasarkan Harga Yang Bertahan, Tahun 1975-1984 (%)										Residual (%)
	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	
Persewaan	42,87	41,17	39,81	39,31	38,45	36,78	37,54	33,99	33,74	34,17	(2,24)
Restorasi & Dekorasi	0,20	0,42	0,27	0,27	0,26	0,26	0,18	0,21	0,20	0,51	0,85
Tekstil Pengolahan	11,75	11,78	13,50	13,60	14,27	15,45	16,24	16,28	14,09	14,09	1,85
Udang & Cumi & AP Bersih	0,44	0,48	0,48	0,52	0,45	0,45	0,51	0,57	0,87	0,86	7,25
Bengawan	20,85	0,97	0,91	0,78	0,83	0,89	0,85	0,94	0,52	0,12	21,78
Pengangkutan, Restorasi & Hotel	1,45	21,45	22,58	22,40	23,89	24,26	23,12	24,72	25,42	19,42	(0,81)
Pengangkutan & Komunikasi	6,34	6,73	6,17	6,03	5,56	6,02	6,37	7,53	7,82	7,10	1,14
Manajemen Persewa Signaturasi Persewa	1,35	1,46	1,57	1,38	1,52	1,37	1,43	1,69	1,82	2,26	6,40
Restorasi	1,25	2,28	2,15	2,95	1,87	1,76	1,76	1,96	1,87	2,13	(0,90)
Manajemen Persewa Signaturasi Persewa	14,09	10,77	11,46	11,78	10,58	10,73	10,86	10,82	10,02	8,43	(2,70)
Manajemen Persewa Signaturasi Persewa	2,30	2,46	2,26	2,12	2,04	2,00	2,05	2,19	2,22	6,93	9,79
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Sektor	Indikator PDB Sektorial Proprietas Jasa Timor Berdasarkan Harga Yang Bertahan, Tahun 1984-2004 (%)										Residual (%)			
	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993		1994		
Persewaan	34,17	35,74	36,83	36,83	36,30	37,14	39,87	39,87	39,87	41,24	41,11	20,01	19,44	(2,53)
Restorasi & Dekorasi	0,51	0,52	0,54	0,55	0,54	0,54	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Tekstil Pengolahan	14,09	15,77	17,26	17,73	18,21	19,68	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18	20,18
Udang & Cumi & AP Bersih	0,56	0,56	0,57	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Bengawan	8,12	8,12	8,34	8,41	8,56	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53
Pengangkutan, Restorasi & Hotel	18,42	18,42	20,48	20,77	21,15	22,63	20,37	20,37	21,03	21,03	21,03	21,03	21,03	21,03
Pengangkutan & Komunikasi	7,10	8,86	8,88	8,94	8,50	8,30	8,88	8,88	8,21	8,03	8,27	8,34	8,27	(0,87)
Manajemen Persewa Signaturasi Persewa	2,25	2,08	2,31	2,47	3,05	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43
Restorasi	2,13	2,00	1,80	1,81	1,80	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
Manajemen Persewa Signaturasi Persewa	8,43	8,10	8,48	8,61	7,83	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31
Manajemen Persewa Signaturasi Persewa	6,83	5,79	6,44	6,48	5,98	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDB Proprietas Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, berbagai sumber, dalam bentuk...

Tabel 8

Struktur PD/B Sektorial Propaganda Jawa Timur Berdasarkan Harga Komitas, Tahun 1975-1984 (%)

Sektor	Tahun										Perubahan Revisi (%)
	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	
Penerbitan	42,87	42,12	40,78	40,44	49,10	33,54	35,30	32,72	33,34	32,34	(2,78)
Penerbitan & Cetak	0,20	0,45	0,42	0,28	0,27	0,24	0,21	0,24	0,25	0,54	10,57
Unitas Pengalihan	11,75	11,48	11,71	12,26	12,60	13,83	15,31	16,41	14,80	18,75	3,63
Unitas & Cetak A/P Berah	0,44	0,46	0,44	0,48	0,61	0,64	0,71	0,84	0,87	0,83	0,40
Penerbitan	0,71	0,56	0,65	0,85	0,90	0,97	1,05	1,14	1,17	0,82	(22,05)
Penerbitan, Hotel & Restoran	20,85	21,60	22,18	21,54	22,25	23,17	24,01	26,27	26,78	18,77	(20,85)
Penerbitan & Komersial	0,34	0,44	0,20	0,30	0,20	0,39	0,78	7,35	8,98	0,76	(0,82)
Kategori Penerbitan, Jasa, Perek	1,33	1,38	1,32	1,39	1,33	1,24	1,25	1,54	1,43	1,86	3,29
Bank dan Lembaga Keuangan lain	2,33	2,30	2,34	2,32	2,34	2,25	2,25	2,24	2,25	2,30	(0,50)
Jasa-jasa	11,08	10,81	11,41	11,86	11,28	11,37	11,17	11,05	10,03	8,80	(2,80)
Persewaan	2,30	2,35	2,28	2,10	2,13	2,05	2,01	2,08	2,14	0,94	(8,85)
Jasa-jasa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Sumber : PD/B Propaganda Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, berbagai masalah, data berseri.

Struktur PD/B Sektorial Propaganda Jawa Timur Berdasarkan Harga Komitas, Tahun 1984-2004 (%)

Sektor	Tahun										Revisi (%)	
	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993		
Penerbitan	32,34	31,81	31,22	30,09	28,74	27,61	19,87	18,33	17,30	16,84	16,47	(3,16)
Penerbitan & Cetak	0,54	0,56	0,55	0,57	0,57	0,56	1,90	1,91	1,70	1,94	1,90	0,03
Unitas Pengalihan	18,75	18,82	17,80	18,10	18,89	19,57	25,18	23,53	21,70	20,53	20,42	1,85
Unitas & Cetak A/P Berah	0,85	0,81	0,80	0,85	0,89	0,90	1,48	1,49	1,77	2,85	3,18	0,69
Penerbitan	6,25	6,06	6,51	6,48	6,67	6,60	6,20	6,51	6,78	4,37	4,49	(1,12)
Penerbitan, Hotel & Restoran	18,77	18,32	18,73	18,80	20,76	21,22	20,37	20,58	20,80	21,04	21,91	2,21
Penerbitan & Komersial	6,76	6,45	6,23	6,53	6,20	6,23	6,64	6,85	6,86	6,74	6,15	1,22
Kategori Penerbitan, Jasa, Perek	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	0,00
Bank dan Lembaga Keuangan lain	2,30	2,14	2,04	1,86	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	0,00
Jasa-jasa	8,80	8,06	8,10	8,80	8,53	8,13	8,13	8,13	8,13	8,13	8,13	0,00
Persewaan	0,94	0,73	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	(1,25)
Jasa-jasa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Sumber : PD/B Propaganda Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, berbagai masalah, data berseri.

V.3 Identifikasi Sektor Basis di Jawa Timur Sebagai Sektor Potensial Yang Mampu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil perhitungan secara sektoral atas dasar harga yang berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 1993 dengan metoda LQ diperoleh hasil bahwa terdapat enam sektor sebagai sektor basis di wilayah provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restaurant
2. Sektor Pertanian
3. Sektor Listrik, Gas & Air Bersih
4. Sektor Industri Pengolahan
5. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, dan
6. Sektor Jasa-Jasa

Sektor perdagangan, hotel & restoran merupakan sektor yang mempunyai nilai LQ paling besar. Hal ini dapat diartikan bahwa sektor perdagangan, hotel & restoran merupakan sektor kunci yang mempunyai kemampuan paling tinggi dalam menggerakkan sektor-sektor lain (basis dan non basis) di wilayah perekonomian provinsi Jawa Timur. Sektor perdagangan, hotel & restoran dapat sebagai *prime mover role* sektor lainnya. Sektor perdagangan, hotel & restoran ini juga merupakan sektor yang mempunyai angka pertumbuhan LQ yang sangat tinggi selama sepuluh tahun terakhir, walaupun pertumbuhannya masih di bawah sektor pertanian.

Diantara sektor basis atau sektor 'kuat' tersebut (dengan nilai $LQ > 1$) yang mempunyai angka pertumbuhan tertinggi dalam satu dasa warsa terakhir adalah sektor pertanian dengan nilai pertumbuhan LQ sebesar 2,24%. Sedangkan sektor perdagangan, hotel & restoran mempunyai tingkat pertumbuhan sedikit lebih rendah, yaitu 2,23%. Sektor pengangkutan dan komunikasi mempunyai pertumbuhan LQ sebesar 1,13%.

Sektor ekonomi di Jawa Timur yang merupakan kategori sektor basis namun memiliki angka kecenderungan / pertumbuhan nilai LQ yang semakin turun adalah sektor Industri Pengolahan; sektor Listrik, Gas & Air Bersih; serta sektor

Jasa-jasa. (Lihat Tabel 9). Sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa merupakan sektor yang termasuk kategori sektor basis di Jawa Timur. Namun demikian, kedua sektor tersebut menunjukkan pertumbuhan nilai LQ yang semakin menurun. Bahkan sejak tahun 2002 sektor industri pengolahan menurun hingga mempunyai nilai LQ dibawah 1 (satu) dihitung atas dasar harga konstan tahun 1993.

Sektor jasa-jasa sejak tahun 2000 memiliki nilai LQ di bawah 1 (satu) dihitung atas dasar harga berlaku. Namun demikian apabila dihitung atas dasar harga konstan tahun 1993 justru menunjukkan kecenderungan nilai LQ yang semakin meningkat dengan tingkat pertumbuhan 0,23%. Hal ini mengindikasikan bahwa secara relatif terjadi penurunan besarnya persentase nilai tambah sektor jasa di Jawa Timur apabila dibandingkan dengan persentase nilai tambah sektor jasa di tingkat nasional yang dihitung atas dasar harga konstan. Perbedaan kecenderungan perhitungan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan berarti adanya pengaruh perubahan harga (perubahan harga negatif / deflasi) pada sektor ini.

Tabel 9
Location Quotient (LQ) Sektoral Di Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 1995 - 2003

Sektor	Tahun (Miliar Rupiah)									Pertumbuhan Rata-rata (%)
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	
Pertanian	0.99	1.00	1.04	1.17	1.11	1.23	1.28	1.22	1.21	2.24
Pertambangan & Galian	0.21	0.20	0.17	0.07	0.16	0.15	0.15	0.18	0.18	-1.51
Industri Pengolahan	1.18	1.13	1.11	1.13	1.05	1.08	1.04	1.05	1.07	-1.07
Listrik & Gas & Air Bersih	1.47	1.41	1.53	1.34	1.54	1.85	1.78	1.43	1.32	-1.20
Bangunan	0.89	0.86	0.90	0.83	0.79	0.78	0.75	0.73	0.71	-2.54
Perdagangan, Restoran & Hotel	1.26	1.28	1.35	1.54	1.43	1.47	1.48	1.47	1.54	2.23
Pengangkutan & Komunikasi	0.92	0.99	0.99	1.12	1.20	1.27	1.19	1.11	1.01	1.13
Kuangan, Persow Bgn & Jasa Persh	0.77	0.79	0.71	0.58	0.62	0.63	0.64	0.59	0.58	-2.97
Jasa-Jasa	1.16	1.16	1.10	1.02	1.00	0.98	0.95	0.93	0.87	-3.12

Sumber : Statistik Indonesia & PDRB Menurut Lapangan Usaha, berbagai terbitan, diolah kembali.

Tabel 10

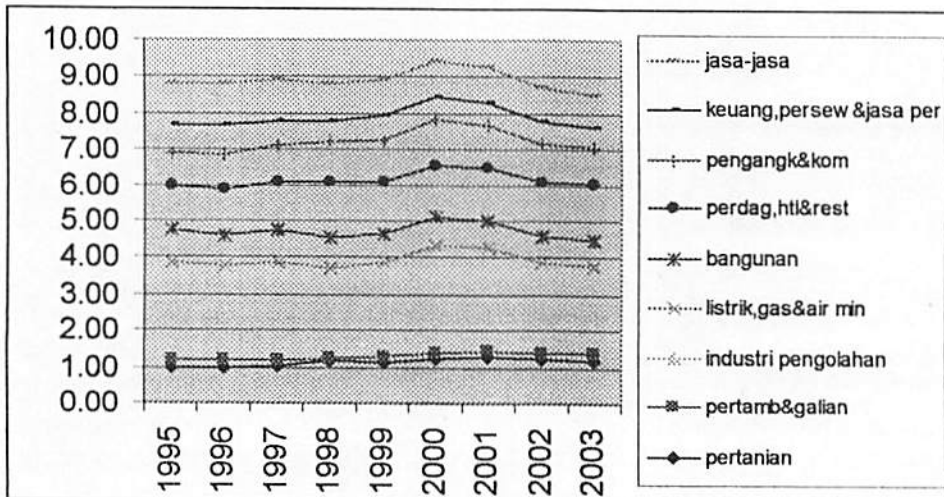
Location Quotient (LQ) Sektoral Di Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 1993
Tahun 1995 - 2003

Sektor	Tahun (Milliar Rupiah)									Pertumbuhan Rata-rata (%)
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	
Pertanian	1.07	1.08	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.06	-0.10
Pertambangan & Galian	0.18	0.17	0.15	0.09	0.15	0.20	0.20	0.20	0.21	1.39
Industri Pengolahan	1.16	1.16	1.20	1.10	1.05	1.02	1.01	0.96	0.96	-2.13
Listrik & Gas & Air Bersih	1.59	1.57	1.39	1.44	1.50	1.58	1.57	1.59	1.63	0.28
Bangunan	0.89	0.86	0.83	0.90	0.82	0.78	0.76	0.73	0.70	-2.62
Perdaggn, Restoran & Hotel	1.24	1.25	1.26	1.31	1.31	1.31	1.37	1.42	1.48	1.92
Pengangkutan & Komunikasi	0.94	0.94	0.89	1.04	1.14	1.14	1.07	1.11	1.04	1.15
Keuang,Persew Bgn&Jasa Persh	0.74	0.73	0.72	0.81	0.81	0.81	0.82	0.81	0.79	0.76
Jasa-Jasa	1.16	1.15	1.14	1.16	1.15	1.16	1.16	1.18	1.18	0.23

Sumber : Statistik Indonesia & PDRB Jatim Menurut Lapangan Usaha, berbagai terbitan, diolah kembali.

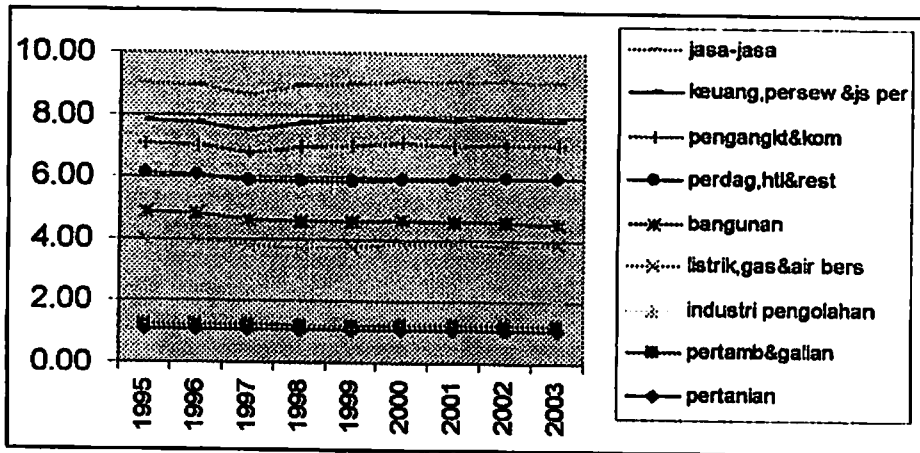
Gambar 3

Pertumbuhan LQ Sektoral Di Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 1995 - 2003



Sumber : Tabel 9, diolah kembali

Gambar 4
Pertumbuhan LQ Sektoral Di Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 1995 – 2003



Sumber : Tabel 10, diolah kembali

V.4 Strategi Pemberdayaan Sektor Basis di Jawa Timur

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode LQ diatas, dapat diidentifikasi bahwa yang menjadi sektor basis atau sektor kunci di Jawa Timur adalah sektor Perdagangan, Hotel & Restaurant, sektor Listrik, Gas & Air Bersih, sektor Industri Pengolahan, sektor Pengangkutan & Komunikasi, serta sektor Jasa-Jasa. Namun demikian dari seluruh sektor basis tersebut yang mempunyai kecenderungan 'menguat' berdasar nilai LQ-nya adalah sektor Perdagangan, Hotel & Restoran; sektor Pertanian, serta sektor Industri Pengolahan.

Untuk meningkatkan dan mendorong berkembangnya sektor-sektor lain (baik yang termasuk kategori sektor basis maupun sektor non basis), maka ketiga sektor ini harus diupayakan untuk diprioritaskan pengembangannya. Sektor basis adalah sektor kunci yang dapat menggerakkan sektor lain (*prime mover*). Sektor basis adalah sektor yang mempunyai efek pengganda yang besar yang dapat meningkatkan perekonomian lebih besar dari sektor non basis. Sektor basis mempunyai kemampuan efek polarisasi dan menyebar (*trikling down effect*) terhadap sektor-sektor lainnya (basis dan non basis).

Provinsi Jawa Timur, disamping mempunyai kemampuan berkembang pada sektor perdagangan dan industri, juga mempunyai potensi besar di sektor pertanian. Sebagian besar penduduk Jawa Timur merupakan masyarakat petani. Sehingga sektor pertanian harus mendapat prioritas pendanaan dibanding sektor-sektor lain. Demikian pula sektor perdagangan harus mendapat prioritas kebijakan dan pemenuhan sarana dan prasarana (infrastruktur) yang dapat memperlancar pengembangan di sektor perdagangan ini.

Untuk memberdayakan sektor basis di Jawa Timur, maka pembangunan ekonomi hendaknya diprioritaskan pada pengembangan pembangunan di sektor basis, dengan harapan akan dapat mendorong sektor-sektor lain (basis dan non basis) untuk berkembang. Konsistensi kebijakan dengan prioritas pada sektor basis hendaknya didukung dengan mengalokasikan dana perencanaan pembangunan secara konsisten terutama untuk sektor basis. Dengan semakin berkembangnya sektor basis, maka diharapkan dapat sebagai penggerak (*leading sector*), baik untuk sektor basis dan sektor non basis lainnya. Sehingga pada akhirnya pertumbuhan ekonomi sektoral dapat berkembang secara merata di seluruh sektor. Dengan strategi pemberdayaan pada sektor basis ini diharapkan bahwa seluruh sektor di Jawa Timur dapat menjadi sektor basis. Hal ini tentunya memerlukan waktu target pencapaian secara bertahap.

V.5 Strategi Pembangunan Ekonomi Sektoral di Provinsi Jawa Timur

Apabila hasil perhitungan ekonomi sektoral di Jawa timur dengan menggunakan analisis LQ dan besarnya kontribusi masing-masing sector dianalisis secara simultan, maka dapat disimpulkan bahwa sektor pembangunan yang patut dikembangkan berdasar urutan prioritas adalah :

1. Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran
2. Sektor Pertanian
3. Sektor Industri Pengolahan
4. Sektor Jasa-Jasa
5. Sektor Pengangkutan & Komunikasi
6. Sektor Listrik, Gas & Air Bersih

7. Sektor Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan
8. Sektor Bangunan
9. Sektor Pertambangan & Galian

Dengan adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi Jawa Timur, maka strategi pembangunan yang dapat diterapkan adalah strategi pembangunan tidak berimbang dengan urutan prioritas atau pilihan penundaan (*postponement choices*). Seperti dikemukakan Hirschman bahwa penentuan prioritas dari program (sektor-sektor) yang akan dilaksanakan harus ditentukan atas dasar penilaian tentang tingkat kemampuan dari sektor tersebut dalam mendorong pengembangan sector-sektor lainnya (*prime mover role*). Dengan kata lain, pembangunan tidak seimbang yang dikemukakan Hirschman bertujuan untuk menentukan jenis sektor-sektor yang harus dibangun terlebih dulu untuk menjamin terciptanya hasil pembangunan yang maksimal di waktu yang akan datang.

Strategi pemberdayaannya adalah dengan :

1. mengalokasikan dana perencanaan pembangunan secara konsisten terutama untuk sektor basis.
2. prioritas pengembangan untuk sektor basis terlebih dulu, baru kemudian untuk sektor lainnya.
3. kebijakan pemerintah daerah Jawa Timur hendaknya secara konsisten mendorong pertumbuhan di sektor basis.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Kesimpulan

Penelitian ini hanya mengidentifikasi sektor basis secara global di provinsi Jawa Timur, tidak memerinci sektor basis pada setiap kabupaten / kota di Jawa Timur. Sehingga perlu dilakukan penelitian dan perhitungan lebih lanjut untuk mengidentifikasi sektor basis di tiap kabupaten / kota di Jawa Timur.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Terjadinya pergeseran pola struktur ekonomi sektoral di provinsi Jawa Timur sejak Pelita I sampai dengan sekarang, yaitu terjadi pergeseran peran dari sektor pertanian ke sektor industri dan sektor perdagangan, hotel & restoran.
 - a. Pada Pelita I – IV struktur perekonomian di Jawa Timur adalah di sektor pertanian.
 - b. Pelita V struktur perekonomian bergeser menjadi sektor industri.
 - c. Sejak Pelita VIII (tahun 2004) struktur perekonomian bergeser perlahan ke sektor perdagangan, hotel & restoran.
2. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa sektor pembangunan yang patut dikembangkan di Jawa Timur berdasar urutan prioritas adalah :
 - a. Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran
 - b. Sektor Pertanian
 - c. Sektor Industri Pengolahan
 - d. Sektor Jasa-Jasa
 - e. Sektor Pengangkutan & Komunikasi
 - f. Sektor Listrik, Gas & Air Bersih
 - g. Sektor Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan
 - h. Sektor Bangunan
 - i. Sektor Pertambangan & Galian

3. Strategi pemberdayaan pembangunan di sektor basis sebagai sektor kunci di provinsi Jawa Timur adalah dengan :
 - a. mengalokasikan dana perencanaan pembangunan secara konsisten terutama untuk sektor basis.
 - b. prioritas pengembangan untuk sektor basis terlebih dulu, baru kemudian untuk sektor lainnya.
 - c. kebijakan pemerintah daerah Jawa Timur hendaknya secara konsisten mendorong pertumbuhan di sektor basis.
4. Untuk mengoptimalkan pembangunan ekonomi di Jawa Timur, strategi pembangunan yang perlu dilakukan adalah strategi pembangunan tidak berimbang dengan prioritas pada sektor basis. Prioritas pembangunan pada sektor basis diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain (basis dan non basis) untuk berkembang.

VI.2 Saran

Penelitian ini hanya mengidentifikasi sektor basis secara global di provinsi Jawa Timur, tidak memerinci sektor basis pada setiap kabupaten / kota di Jawa Timur. Untuk penelitian yang lebih akurat dan lebih mendetail untuk tiap kabupaten / kota di Jawa Timur, perlu dilakukan penelitian dan perhitungan lebih lanjut tentang sektor basis di tiap kabupaten / kota di Jawa Timur.

Untuk mencapai hasil yang optimal dari proses pembangunan yang dilakukan di provinsi Jawa Timur, dan mengingat adanya keterbatasan dana pembangunan, maka penentuan perencanaan pembangunan sektoral di Jawa Timur harus melalui suatu kajian riset yang akurat. Dari hasil kajian tersebut, hendaknya Pemerintah Daerah (c.q. Bappeprov) dapat secara konsisten dan terkoordinasi dapat mengimplementasikannya, sehingga hasil pembangunan dapat efisien dan efektif. Untuk mendorong tercapainya pertumbuhan dan pemerataan pembangunan tersebut diatas, maka perlu perencanaan yang matang, meliputi :

- a. prioritas sektoral dan regional
- b. alokasi dana berdasar urutan prioritas tersebut, dan
- c. kebijakan pemerintah daerah Jawa Timur yang konsisten mendorong pertumbuhan terutama di sektor basis.

Adanya berbagai perangkat tehnik analisis perencanaan dapat dimanfaatkan untuk mencapai target pertumbuhan dan pemerataan yang maksimal dalam pembangunan di provinsi Jawa Timur. Kerjasama alternatif untuk mematangkan perencanaan ekonomi secara regional dan spasial.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, Iwan Jaya, 1994, *Ilmu Ekonomi Regional Dan Beberapa Aplikasinya Di Indonesia*, Bibliografi, LPFE-UI, Jakarta.

Boediono, 1985, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta.

Glasson, John, 1990, *Pengantar Perencanaan Regional*, terjemahan, edisi kedua, LPFE-UI, Jakarta.

Istifadah, Nurul, 2001, *Analisis Pembangunan EkonoI Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dengan Memakai Pendekatan SWP (Satuan Wilayah Pembangunan)*, Lemlit Universitas Airlangga, Surabaya.

Jhingan, 1996, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Kadariah, 1982, *Ekonomi Perencanaan*, LPFE-UI, Jakarta.

Kuncoro, Mudrajad, 2002, *Analisis Spasial Dan Regional*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Moleong, Lexy J, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, terjemahan, PT Rosdakarya, Bandung.

Rahardja, Prathama, dan Mandala Manurung, 2001, *Teori Ekonomi Makro, Suatu pengantar*, LPFE-UI, Jakarta.

Richardson, Harry W, 1991, *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*, LPFE-UI, terjemahan, Jakarta.

Tarigan, Robinson, 2005, *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

-----, Kompas, 17 April 2004.

RIWAYAT HIDUP KETUA PENELITI

1. Nama Lengkap : Drs. Ec. Bustani Berachim
2. Umur / Jenis kelamin / Agama : 55 tahun / Laki-laki / Islam
3. A l a m a t : Kedondong Lor IV / 16 Surabaya
4. Pangkat / Golongan / NIP : Lektor / IVa / 130 541 823
5. Jabatan sekarang : Dosen Tetap Fakultas Ekonomi
6. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
7. Alamat Kantor : Jl. Airlangga 4 Surabaya
8. Riwayat Pendidikan Tinggi : Fak. Ekonomi, Univ. Airlangga Surabaya
9. Pengalaman Penelitian :
 - a. Manfaat Pengembangan Tanaman Kenaf Untuk Serat Karung Bagi Petani Kecamatan Bungah kabupaten Gresik, Tahun 1989.
 - b. Analisa Masalah Tenaga Kerja dan Perkembangannya Pada Periode Pembangunan 1961 – 1989, Tahun 1989.
 - c. Analisa Pergeseran Struktur Ekonomi Dalam Kaitan Usaha Pembangunan Sarana Dan Pengembangan Industri Periode 1969 – 1986, Tahun 1990.
 - d. Perubahan Struktur Ekonomi Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 1993.
 - e. Analisa Pembangunan Ekonomi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dengan Memakai Pendekatan SWP (Satuan Wilayah Pembangunan), 2001.
10. Publikasi Hasil penelitian :
 - a. Pekerja Wanita Di Perusahaan PMA (Suatu Studi Di Kotamadya Surabaya), Jurnal Penelitian Dinamika Sosial, ISSN 1411 6383, 2001.

RIWAYAT HIDUP ANGGOTA PENELITI

1. Nama Lengkap : Nurul Istifadah, S.E.,M.Si.
2. Umur / Jenis kelamin / Agama : 38 tahun / Perempuan / Islam
3. A l a m a t : Klampis Semolo Barat III / i-10 Surabaya
4. Pangkat / Golongan / NIP : Penata Muda Tingkat I / IIIb / 132 205 435
5. Jabatan pokok : Dosen Tetap Fakultas Ekonomi
6. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
7. Alamat Kantor : Jl. Airlangga 4 Surabaya
8. Riwayat Pendidikan Tinggi :
 - IESP, Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga Surabaya, 1993.
 - Ilmu Manajemen, Pasca Sarjana, Universitas Airlangga Surabaya, 2005.
9. Pengalaman Penelitian :
 - a. Analisa Pembangunan Ekonomi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dengan Memakai Pendekatan SWP (Satuan Wilayah Pembangunan), 2001.
 - b. Analisa Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Kota Surabaya Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Keuangan, 2002.
 - c. Analisis efektivitas Penggunaan Dana APBD Surabaya Dalam Menggerakkan Pembangunan Sektoral Di Surabaya : Kajian Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Kebijakan Undang-Undang Otonomi Daerah, 2003
 - d. Pembinaan, Penataan, dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Swasta Di Surabaya, 2004
 - e. Strategi Penanggulangan Ketimpangan Spasial Antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2005
 - f. Analisis Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Sebagai Implementasi Undang-Undang Otonomi Daerah Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah di Jawa Timur, 2005.

10. Publikasi Hasil penelitian :

- a. **Pekerja Wanita Di Perusahaan PMA (Suatu Studi Di Kotamadya Surabaya), Jurnal Penelitian Dinamika Sosial, ISSN 1411 6383, 2001.**
- b. **Analisa Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Kota Surabaya Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Keuangan, Jurnal Penelitian Dinamika Sosial, ISSN 1411 6383, 2002.**
- c. **Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Penanggulangan Ketimpangan Spasial Antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2005**